

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN
YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

HANIF WIRA CENDIKA

NPM : 1351010209

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN
YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. Asriani, S.H., M.H.
Pembimbing II : Evi Ekawati, S.E., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Pekerja anak yaitu anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Dengan adanya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka siapapun melarang anak untuk bekerja dan anak berhak atas perlindungan dari pemerintah dan orangtua. Akan tetapi, di Kota Bandar Lampung sendiri masih banyak anak jalanan yang bekerja baik laki-laki maupun perempuan.

Dari latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah yang dibuat yaitu, bagaimana peran pemerintah untuk mengatasi masalah anak yang bekerja dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Islam. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Islam terhadap anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung.

Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Sementara data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dimana menggunakan *purposive sampling* dengan mengambil sampel sepuluh anak. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja temuan yang ada di lapangan untuk dianalisis.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di Disnakertrans dan Dinas PPPA bahwa pemerintah sudah melakukan sosialisasi, pengawasan, dan menjalankan program pengurangan pekerja anak di bawah umur. Tetapi kenyataan di lapangan program yang dibuat oleh pemerintah masih belum optimal terlihat dari masih banyaknya anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak yang bekerja dalam perspektif ekonomi Islam sudah menerapkan prinsip ekonomi Islam karena sudah melakukan upaya pengurangan pekerja anak di bawah umur dan pemerintah telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah) dalam berkeadilan dan menyejahterakan masyarakatnya melalui program-program yang telah dibuat. Namun kenyataan di lapangan masih banyaknya anak jalanan yang bekerja disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang merupakan akar dari permasalahan anak bekerja.

Kata kunci : peran pemerintah, pekerja anak, konsep ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, 35131, Telp/Fax. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : “Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung)”

Nama : Hanif Wira Cendika

NPM : 1351010209

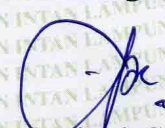
Jurusan : Ekonomi Syari’ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Dr. Asriani, S.H., M.H.
NIP. 19660506 199203 2 001

Pembimbing II,


Evi Ekawati, S.E., M.Si.
NIP. 19760202 200912 2 001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari’ah**


Madnasir, S.E., M.Si.
NIP. 19750424 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat Jl. Let. Kol. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131, Telp/Fax. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI
MASALAH ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI PADA DINAS PEMERINTAH KOTA
BANDAR LAMPUNG), disusun oleh: Hanif Wira Cendika, NPM:
1351010209, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung pada Hari/Tanggal, Rabu, 8 November 2017.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : A. Zuliansyah, M.M.

Sekretaris : Yulistia Devi, M.S.Ak.

Penguji I : Dr. Heni Noviarita, M.Si.

Penguji II : Dr. Asriani, M.H.

**DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Dr. Moh. Bahrudin., M.A
NIP. 195805241989031003**

MOTTO

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.”¹

(QS. As-Sajdah : 24)



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemaah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), h . 754

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Papa Sufiat dan Mama Agustina sari yang selalu saya hormati dan yang paling saya cintai untuk menjadi panutan di dalam kehidupanku. Kedua orang tuaku selalu mendengarkan keluh kesahku dan selalu memberi semangat agar kelak menjadi anak yang soleh dan berhasil di kemudian hari. Semoga kalian berdua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT karena telah merawat diriku dengan sabar dan ikhlas serta mendoakan aku sampai saat ini.
2. Kakakku Elfira Puspita Wardani yang selalu mendoakan aku dan menjadi orang tua keduaku yang selalu mengingatkan kepadaku yang mana yang benar dan yang salah. Adikku Kamila Yummi Hanifa yang senantiasa selalu mendoakanku dan menyemangatiku. Berkat doa dan dukungan dari kalian penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman hidupku Renny Desugiharti yang selalu memberikan doa kepadaku, menemaniku, memotivasi, dan tidak lelah untuk selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu UIN Raden Intan Lampung, semoga terus menciptakan generasi yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik dari segi pendidikan dan Agama Islam.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama lengkap Hanif Wira Cendika, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Juli 1995. Penulis bertempat tinggal di Jl Purnawirawan Gg Swadaya II No 54 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Sufiat dan Ibu Agustina Sari.

Adapun riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan yaitu pada tahun 2000 penulis menginjak pendidikan pertama di TK Kartika Jaya Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2001. Pada tahun 2001 penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun 2010 melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA di SMA Negeri 7 Bandar Lampung dan diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul *“Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”* dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, dan pengikut-pengikut-Nya yang selalu setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Ekonomi Islam.

Atas bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Moh Baharuddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.Si., selaku Kepala Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi dan memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Asriani, S.H., M.H., dan Evi Ekawati, S.E., M.Si., sebagai dosen pembimbing I dan II yang selalu memberikan masukan, motivasi,

dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan staf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Sahabat seperjuangan khususnya Hernanda Wijaya, Erfan Nureza, Aditya Syaiful Rachman, Harry Azhar dan seluruh anggota Kelas A Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan hingga proses skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 3 November 2017
Penulis,

Hanif Wira Cendika
NPM. 1351010209

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah	5
D. Rumusan Masalah	19
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
F. Metodologi Penelitian	20
 BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Peran Pemerintah	29
1. Pengertian Peran	29
2. Pengertian Pemerintah	30
3. Peran Pemerintah	32
4. Tugas dan Fungsi Pemerintah	32
B. Pekerja Anak	35
1. Pengertian Anak	35
2. Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak	37
3. Prinsip-prinsip Hak Anak	40
4. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja	41
5. Anak Jalanan	42
6. Anak yang Bekerja	43
7. Batas Umur Anak	44

8. Pengertian Pekerja Anak	45
9. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	47
10. Bentuk Pekerjaan Untuk Anak	51
a) Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak	51
b) Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak	54
11. Faktor Timbulnya Anak Bekerja	57
12. Dampak Negatif dari Pekerja Anak Terhadap Perkembangan Anak	61
13. Kewajiban Orangtua Terhadap Tumbuh Kembang Anak	64
C. Ekonomi Islam	68
1. Pengertian Ekonomi Islam	68
2. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Tentang Keadilan dan Perlindungan	69
3. Islam Memandang Pekerja Anak	72

BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS PEMERINTAH

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandar Lampung	76
1. Sejarah Disnakertrans	76
2. Visi dan Misi Disnakertrans	77
3. Tugas dan Fungsi Disnakertrans	78
4. Struktur Organisasi Disnakertrans	78
5. Kondisi Sumber Daya Disnakertrans	80
6. Program-program Kerja Disnakertrans	81
B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung	82
1. Sejarah Dinas PPPA	82
2. Visi dan Misi Dinas PPPA	82
3. Tugas dan Fungsi Dinas PPPA	83
4. Struktur Organisasi Dinas PPPA	84
5. Kondisi Sumber Daya Dinas PPPA	86
6. Program-program Kerja Dinas PPPA	87

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Peran Yang Dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja	88
--	----

1. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak Yang Dilakukan Pemerintah (DISNAKERTRANS) Kota Bandar Lampung Tentang Ketenagakerjaan	88
2. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak Yang Dilakukan Pemerintah (DINAS PPPA) Kota Bandar Lampung Tentang Perlindungan Anak	105
B. Peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Islam terhadap anak yang bekerja di Kota Bandar Lampung	109

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2016	7
2. Tabel 1.2 Tingkat Pekerja Anak Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015	10
3. Tabel 1.3 Data Persentasi Anak Sekolah dan Tidak Sekolah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015	15
4. Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung	79
5. Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung	79
6. Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung	80
7. Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	85
8. Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	85
9. Tabel 3.6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	86
10. Tabel 4.1 Upah Yang Diterima Pekerja Anak Di Kota Bandar Lampung	90
11. Tabel 4.2 Upah Minimum Kota (UMK) Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2017	91
12. Tabel 4.3 Hasil Wawancara Kepala Seksi Pengawasan Disnakertrans Kota Bandar Lampung	102
13. Tabel 4.4 Hasil Wawancara Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	106

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Permohonan Izin Riset
2. Lampiran 2 : Rekomendasi Penelitian/Survei
3. Lampiran 3 : Izin Penelitian
4. Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
5. Lampiran 5 : Hasil *Coding* Wawancara
6. Lampiran 6 : Struktur Organisasi
7. Lampiran 7 : Surat Keputusan Dekan FEBI UIN Raden Intan Lampung
8. Lampiran 8 : Kartu Konsultasi Skripsi
9. Lampiran 9 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal sebelum penulis menulis pembahasan dan menguraikan lebih lanjut penulisan skripsi, akan lebih baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul skripsi ini, dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas dan dapat dipahami dari makna yang ditulis oleh penulis.

Adapun judul skripsi yang akan penulis buat yaitu “PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan

adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

2. Pemerintah

Pemerintah adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas.²

3. Masalah

Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya.³

4. Anak jalanan yang bekerja

Anak jalanan yang bekerja adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.⁴

5. Perspektif

Perspektif merupakan sudut pandang atau pandangan.⁵

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009), hlm. 212-213.

² Drs.H.Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Ed.rev-cet.5, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2009), hlm.176.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Cetakan ke-15 : CV. Alfabeta, Bandung, 2010), hlm. 25.

⁴ Kementrian Dalam Negeri, *Anak Jalanan*, akses pada <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2001/01/08/keputusan-mendagri-no-5-tahun-2001>, (Kamis, 19 Januari 2017, 20:46 WIB).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Perspektif*, akses pada <http://www.kbbi.web.id/perspektif>, (Rabu, 12 Juli 2017, 00:19 WIB)

6. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki kegiatan-kegiatan manusia dalam usaha-usahanya untuk memperoleh benda-benda pemuas guna keperluan hidupnya yang diarahkan kepada kemakmuran, serta segala peristiwa-peristiwa yang timbul sehubungan dengan usahanya tersebut.⁶

7. Islam

Islam adalah agama Tauhid. Perkataan Tauhid erat hubungannya dengan kata *wahid* (satu atau Esa) dalam bahasa Arab. Sebagai istilah yang dipergunakan dalam membahas ketuhanan (segala sesuatu mengenai Tuhan). Tauhid adalah keyakinan akan keesaan Tuhan yang dalam ajaran Islam disebut Allah.⁷

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud dari judul ini adalah penelitian secara linier dalam mencari hubungan pemerintah dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur dalam pandangan ekonomi Islam.

⁶ G.Kartasapoetra Agoes Rakhmat Danny, *Ilmu Ekonomi Umum*, (Edisi Pertama : CV. Armico, Bandung, 1982), hlm.2.

⁷ Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Ed.1 : Bumi Aksara, Jakarta, 2007), hlm.2.

⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Edisi satu : Rajawali Pers, Jakarta, 2015), hlm.19.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan objektif dan subyektif adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Bagi penulis pentingnya meneliti/menulis masalah yang akan diteliti terkait dengan judul skripsi. Hal ini dikarenakan penelitian ingin membahas tentang peran pemerintah dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur.

Karena dengan melihat fenomena sekarang yang terjadi di Kota Bandar Lampung, masih banyak anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan hak atas pendidikan dan kasih sayang dari orangtua dan pemerintah lalu mereka kehilangan masa bermain yang tidak akan didapatkan saat dewasa. Selanjutnya pemerintah masih kurang banyak memberikan pembelajaran dan sosialisasi bagi orangtua tentang larangan mempekerjakan anak-anaknya. Kemudian Islam juga melarang keras kepada orangtua yang menelantarkan anak-anaknya seperti dengan sengaja mempekerjakan anak mereka sendiri. Dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul ini untuk diteliti.

2. Alasan Subjektif

Bagi penulis banyak referensi pendukung dari skripsi yang akan diteliti. Sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini kedepannya. Sedangkan dari judul skripsi yang penulis ambil mempunyai perbedaan dari skripsi lainnya yaitu penulis ingin meneliti bagaimana peran pemerintah di

Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah pekerja anak dibawah umur. Selain itu judul yang diajukan sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Hal ini didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan, serta keberadaan tempat penelitian dekat dengan alamat rumah penulis hal ini bisa mempermudah penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

C. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu negara harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam konstitusi negara.⁹

Sebagai negara hukum tentunya segala aspek kehidupan bangsa dan negara diatur oleh hukum termasuk dalam masalah tenaga kerja. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu.

Tugas pokok suatu pemerintah yang harus dijalankan yaitu melindungi setiap warga negara dan memberikan hak asasi yang harus diakui, dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah, adalah hak asasi dibidang ketenagakerjaan, yakni hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi

⁹ Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Internal (Studi Kasus Di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2012 (Senin, 23 Januari 2017, 21:30 WIB).

kemanusiaan, di samping itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menentukan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.¹⁰

Indonesia dengan jumlah total penduduk terpadat keempat di dunia setelah China, India dan Amerika Serikat, negara kita mempunyai jumlah penduduk 250 juta jiwa yang memiliki banyak ketersediaan tenaga kerja.¹¹

Jumlah penduduk yang semakin besar akan membawa akibat jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa pemerintah harus bisa menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru agar dapat menyejahterakan masyarakatnya.¹²

Tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan maupun investor dari luar maupun dalam negeri karena banyak calon tenaga kerja yang akan ditempatkan untuk mengisi posisi yang dibutuhkan perusahaan. Berikut ini akan disajikan jumlah tenaga kerja di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2016 yang bekerja dan yang tidak bekerja sebagai berikut :

¹⁰ Netty Endrawati, *Ibid*, hlm.271

¹¹ Anik Widiastuti, M.Pd., *Problematika Ketenagakerjaan Di Indonesia, Diktat UNY 2013*, hlm.3(Kamis, 19 Januari 2017, 21:22 WIB).

¹² Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia, Ed.1, Cet.1*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53-54

Tabel 1.1
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2010-2016

<i>Dalam Juta</i>	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tenaga Kerja	116,5	119,4	120,3	120,2	121,9	122,4	127,8
- Bekerja	108,2	111,3	113,0	112,8	114,6	114,8	120,8
- Menganggur	8,3	8,1	7,3	7,4	7,2	7,6	7,0

*Sumber : BPS data diolah tahun 2010 sampai 2016*¹³

Kesimpulan dari jumlah total tenaga kerja di Indonesia, cenderung mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun walaupun ada penurunan di tahun 2013 sejumlah 0,1 juta dari 120,3 ke 120,2 yang kemudian naik kembali hingga 127,8 juta pada tahun 2016 yang merupakan jumlah tenaga kerja paling besar dari tahun 2010. Dari jumlah data tenaga kerja yang bekerja dan yang menganggur terus mengalami peningkatan di sektor bekerja hingga mencapai 120,8 juta dan di sektor menganggur terus cenderung menurun di angka 7,0 juta pada tahun 2016 dari tahun 2010 sebesar 8,3 juta.

Program pemerintah saat ini telah berhasil dengan banyaknya jumlah angkatan kerja yang telah mendapatkan pekerjaannya dan pengangguran di negara kita telah berkurang, pemerintah masih punya salah satu masalah serius yang harus diselesaikan yaitu penyimpangan ketenagakerjaan yang berfokus pada masalah pekerja anak di bawah umur (eksploitasi anak) yang bahkan sering kali menjadi sorotan media atas pelanggaran tersebut. Dalam hal ini pemerintah harus menjamin hak dan kewajiban asasi warga negara dan rakyatnya dalam

¹³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Tenaga Kerja Indonesia*, akses pada <http://www.bps.go.id>, (12 Juli 2017, 01:07 WIB)

konstitusi negara, sebagai konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan yang dianut salah satunya kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.¹⁴

Untuk itu setiap anak berhak atas hak dan kewajibannya untuk tumbuh dan berkembang sehingga orang tua dilarang menelantarkan anak-anak mereka dimana telah diatur oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Orang tua dapat dikenakan sanksi hukuman kurungan yang cukup berat, termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur.¹⁵

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan, Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.¹⁶

Menurut catatan ILO (Organisasi Perburuhan Internasional), paling tidak dari 215 juta pekerja anak, 115 juta bekerja di tempat berbahaya di seluruh dunia. Terjadi peningkatan pekerja anak di daerah bahaya dengan usai 15-17 tahun.

¹⁴ Netty Endrawati, *Loc.Cit*, hlm. 273.

¹⁵ Nandi, Pekerja Anak Dan Permasalahannya, *Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6, No.2, Oktober 2006*, hlm.1 (Selasa, 24 Januari 2017, 21:30 WIB).

¹⁶ Kementrian Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) dan (4) tentang *Penanggulangan Pekerja Anak*, akses pada <http://www.kemendagri.go.id/> (Kamis, 19 Januari 2017, 20:46 WIB).

Hampir 60 persen anak pekerja di tempat berbahaya adalah laki laki. Di negara kita, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 juta anak-anak adalah pekerja. Pekerja anak ditemukan hampir di semua kabupaten.¹⁷

Ketentuan yang dilarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹⁸, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.¹⁹ Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.²⁰

Eksplorasi anak itu sendiri menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara

¹⁷ LinkedIn, *Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*, akses pada <https://www.linkedin.com/pulse/indonesia-bebas-pekerja-anak-tahun-2022-antara-harapan-mawardi-s-t-?forceNoSplash=true>, (Kamis, 19 Januari 2017, 22:00 WIB).

¹⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*.

¹⁹ Undang-Undang No 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*.

²⁰ Netty Endrawati, *Loc. Cit*, 271

tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain.²¹ Di Bandar Lampung sendiri masih banyak anak yang bekerja di bawah umur baik laki-laki maupun perempuan. Data berikut ini menunjukkan angka pekerja anak (eksploitasi anak) di Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 sampai 2015 sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Pekerja Anak
(Child Labour Rate-CLR)
Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

Jenis Kelamin/Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
Laki-laki	4,74	4,88	4,66	4,61	4,57
Perempuan	5,11	5,25	5,11	5,05	5,00
Perkotaan	9,85	10,13	9,77	9,66	9,57
Total	6,57	6,75	6,51	6,44	6,38

Sumber : BPS, diolah dari Sakernas Agustus 2011-2015²²

Tingkat pekeja anak pada jenis kelamin laki-laki terus mengalami penurunan namun mengalami kenaikan pada tahun 2012 dari sebelumnya 4,74% menjadi 4,88% yang mengalami kenaikan 0,14% dan penurunan ini diikuti juga oleh pekerja anak pada perempuan yang tiap tahunnya terus-menerus mengalami penurunan namun mengalami kenaikan juga di tahun 2012 sebesar 5,25%. Namun setelah itu angka pekerja anak perempuan terus menurun sampai tahun 2015 sebesar 5,00%. Hasil dari penelitian ternyata tingkat pekerja anak baik laki-

²¹ Astriani Rahman, Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh, *Jurnal Universitas Gunadarma*, 2013, hlm.2 (Kamis, 19 Januari 2017, 21:30 WIB).

²² Badan Pusat Statistik, *Tingkat Pekerja Anak Kota Bandar Lampung 2011-2015*, akses pada <http://www.bps.go.id>, (13 Februari 2017, 21.39 WIB).

laki maupun perempuan di Kota Bandar Lampung masih banyak ditemukan akan tetapi jumlahnya semakin tahun semakin menurun hingga mencapai 9,57% pada tahun 2015 dari tingkat jumlah pekerja anak di Kota Bandar Lampung yang paling tinggi di angka 10,14% pada tahun 2012.

Kemiskinan bukan satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup dilingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja dari pada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka.

Seharusnya anak-anak tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja, karena usia anak tersebut masih dalam usia yang seharusnya duduk dibangku sekolah. Pemerintah daerah tampaknya kurang memperhatikan secara serius terhadap pekerja anak ini. Hal ini, dapat dilihat dari masih banyaknya anak di Kota Bandar Lampung yang masih bekerja diusia yang rentan akan keselamatan, kesehatan dan sosial lingkungannya.

Banyaknya jumlah pekerja anak di Kota Bandar Lampung karena mereka berinisiatif untuk menambah keuangan keluarga agar mereka dapat membeli sesuatu barang atau kebutuhan pokok atas hasil jerih payah dari apa yang mereka hasilkan dengan upah yang dapat dibilang tidak sesuai dengan jaminan keselamatan, kesehatan tumbuh kembang mereka dan faktor-faktor lainnya.

Orang tua mereka sendiri malah menjadikan mereka sebagai bagian tulang punggung keluarga yang seharusnya mereka mendapatkan hak dan tanggung jawabnya atas pendidikan, kesehatan dan kasih sayang kebersamaan dari orang tua mereka.

Peran pemerintah dalam hal ini harus melindungi, mencegah, menghapuskan, dan memberikan hak-hak yang semestinya diberikan oleh anak-anak seusianya seperti sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang pendidikan dan menumbuhkan keahlian kreatifitas yang ada pada diri mereka khusus bagi kalangan yang perekonomiannya kurang mampu agar kedepannya masa depan anak-anak di Indonesia dapat menjadi lebih baik untuk menggapai cita-citanya dan mampu bersaing di dunia kerja dan harapan besarnya dapat mampu berkarya untuk mengharumkan negara Indonesia di ajang internasional.

Hal ini dapat ditentukan dari sistem kerja dan kontrol pemerintah yang memiliki tugas dan tujuan atas kekuasaan suatu negara. Tujuan dari pemerintah salah satunya adalah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental yaitu untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi rakyatnya. Apabila untuk mencapai sebuah tujuan bernegara yang menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera maka pemerintah harus melakukan berbagai strategi kebijakan yang mengarah dan terfokus untuk mengatur masalah sosial dan kesejahteraan yang dialami oleh masyarakatnya.

Pemerintah merupakan salah satu unsur penting dari pada negara. Tanpa pemerintah, maka negara tidak ada yang mengatur. Karena pemerintah merupakan roda negara, maka tidak akan mungkin suatu negara tanpa pemerintah.²³

Pada hakekatnya menciptakan suatu bangsa yang sejahtera maka pemerintah dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk mendorong suatu kesejahteraan yang telah direncanakan oleh pemerintah kedepannya yang kemudian dapat dirasakan manfaatnya dimasyarakat dikemudian hari. Apabila rencana pemerintah telah tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya maka tujuan pemerintah telah berhasil dan disatu sisi pertumbuhan perekonomian negara akan terus tumbuh dan berkembang lalu akan menciptakan banyak peluang untuk menyerap tenaga kerja yang kemudian akan berdampak mengurangi pengangguran yang menjadi suatu masalah timbulnya kemiskinan.

Dapat dijelaskan secara umum, tugas-tugas pokok pemerintah menurut teori Adam Smith yang dikemukakan oleh Rasyid terdiri dari tiga pokok yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
2. Menyelenggarakan peradilan.
3. Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Tugas-tugas pokok di atas menjadi tugas yang berat bagi pemerintah agar dapat menciptakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang merata

²³ Abu Ahmadi, *Loc.Cit*, hlm.175.

diseluruh daerah yang akan berdampak meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi dan sosial di tiap-tiap daerah dan akan menumbuhkan daya kreatifitas masyarakatnya dalam menciptakan sesuatu hal yang inovatif dan dapat dikembangkan.²⁴

Dijelaskan juga berkaitan dengan tugas pemerintah yang berdasarkan konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakat tertuang pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang dibuat oleh pemerintah tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa :²⁵

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan anak maka kewajiban anak untuk memperoleh hak-hak salah satunya yaitu pendidikan untuk tercapainya masa depan yang harus didasarkan pada kemauan diri sendiri dan pentingnya peran orangtua untuk menumbuhkan rasa ingin sekolah yang tinggi. Data berikut menunjukkan tingkat pendidikan anak yang sekolah dan yang tidak sekolah di Kota Bandar Lampung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung.

²⁴ Rasyid, *Makna Pemerintahan*, (Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), hlm. 15

²⁵ Undang-undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

Tabel 1.3
Data Persentasi Anak Sekolah dan Tidak Sekolah
Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015

Kelompok Umur L dan P	2011		2012		2013		2014		2015	
	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS	S	TS
7 – 12	97,9	2,1	98,6	1,4	99,0	1,0	99,3	0,7	100	0
13 – 15	86,3	13,7	90,0	10,0	91,0	9,0	88,5	11,5	96,1	3,9

Keterangan : (L) = Laki-laki (S) = Sekolah
(P) = Perempuan (TS) = Tidak Sekolah

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2015²⁶

Disimpulkan dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat persentasi anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7-12 tahun pada tahun 2011 yang sekolah sebanyak 97,9 persen artinya masih ada 2,1 persen anak laki-laki dan perempuan yang berumur 7-12 tahun yang tidak sekolah. Kemudian persentasi anak laki-laki dan perempuan yang berumur 13-15 tahun pada tahun 2011 yang bersekolah sebanyak 86,3 persen dan sebanyak 13,7 persen anak yang tidak bersekolah.

Jumlah persentase anak yang berumur 7-12 tahun yang bersekolah tiap tahunnya terus mengalami kenaikan hingga mencapai 100 persen di tahun 2015 dan jumlah anak yang tidak bersekolah terus menurun tiap tahunnya hingga mencapai angka 0 persen di tahun 2015. Jumlah ini sama terjadi pada anak yang berumur 13-15 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang bersekolah mengalami kenaikan ditiap tahunnya hingga mencapai angka 96,1 persen pada tahun 2015 walaupun ada penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah

²⁶ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandar Lampung tahun 2011 sampai 2015*, Persentasi Anak Sekolah dan Tidak Sekolah Kota Bandar Lampung, hlm. 29

88,5 persen pada tahun 2014. Adapun juga mengalami penurunan anak yang tidak bersekolah setiap tahunnya sampai pada angka 3,9 persen di tahun 2015.

Pemerintah dalam hal ini telah menjalankan kewajibannya membantu tumbuh kembang anak agar menjadi anak yang bisa memiliki potensi-potensi bakat yang luar biasa dikemudian hari. Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan membantu anak yaitu dengan cara memberikan sekolah dengan gratis bagi sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) bahkan sampai sekolah menengah atas (SMA). Memungkinkan agar anak bisa mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang maksimal.

Persoalan pekerja anak di atas Ekonomi Islam sendiri memandang pekerja anak di bawah umur merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Agama karena sama saja orang tua membiarkan anak mereka terlantar kehilangan hak-hak seusianya untuk bermain dengan teman sebaya mereka dan tidak bertanggung jawab atas mereka dan Nabi Muhammad SAW sendiri melarang anak untuk tidak bekerja yang dijelaskan pada Al-Quran dan Hadist sebagai berikut :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا

كَبِيرًا ﴿١٧٨﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra’ ayat 31)²⁷

Lalu dalam sebuah Hadist Sahih Bukhari No. 2664 dan Sahih Muslim No. 1868 Nabi Muhammad SAW menjelaskan batasan kedewasaan dalam Islam yaitu umur 15 tahun dan di bawah 15 tahun masih dalam tanggung jawab orang tua sebagai berikut ini hadist :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ٍ فالتفتلوانا وابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ٍ وعرضني يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : ان هذا الحد بين المن كان ابن خمس عشرة سنة : ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال (رواه البخاري)

Artinya :

“Diriwayatkan dari Ibn Umar r.a. Rasulullah Saw. Memeriksa saya pada waktu akan pergi ke Perang Uhud, sedangkan saya ketika itu masih berumur empat belas tahun, lalu beliau tidak memperbolehkan saya turut berperang. Kemudian pada waktu akan pergi ke perang khandaq, beliau memeriksa saya lagi, sedangkan saya ketika itu berumur lima belas tahun, maka beliau memperbolehkan saya turut berperang. Nafi' berkata, kemudian saya pergi menemui "umar bin Abd Al-Aziz, yang ketika itu dia sudah menjadi khalifah, dan menceritakan hadis tersebut kepadanya. Kemudian dia berkata, hadis inilah yang menjelaskan batas anak kecil dan dewasa. Kemudian dia menulis surat kepada semua pegawainya agar mereka mewajibkan anak yang sudah berumur lima belas tahun untuk melakukan perintah agama, sedangkan anak yang masih berumur di bawahnya berada dalam tanggungan keluarganya”.²⁸

²⁷ Al-Quran, Surah Al-Isra’ Ayat 31

²⁸ Hadist, Sahih Al-Bukhari No. 2664 dan Sahih Muslim No. 1868

Kemudian dijelaskan juga dalam sebuah hadist dimana anak merupakan suatu titipan dari Allah SWT yang harus dijaga. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Pemberian orangtua kepada anaknya yang lebih baik dari pada pendidikan yang baik”. (HR. Ahmad Bayhaqi)²⁹

Hadist di atas dapat disimpulkan bahwa orangtua hendaknya lebih memberikan pendidikan yang baik dari pada memberikan sesuatu yang kurang bermanfaat.

Penjelasan di atas penulis mengambil contoh pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang pekerja anak di bawah umur (eksploitasi anak) dijelaskan bahwa pekerja anak di bawah umur disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, karena mereka ingin membantu orang tua mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga dari kemiskinan. Sedangkan pemerintah masih kurang tanggap dan perlu adanya sosialisasi dan pelatihan-pelatihan pendidikan terhadap anak-anak untuk memotivasi dan menumbuhkan rasa ingin sekolah yang tinggi.

Penulis ingin mencari tahu lebih dalam apakah ada faktor lain di Kota Bandar Lampung ini anak jalanan yang bekerja selain disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial. Karena saat ini faktanya di Kota Bandar Lampung masih banyak anak jalanan yang bekerja yang masih bekerja. Lalu bagaimanakah peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan kontribusi, sosialisasi dan

²⁹ Hadist, *Ahmad Bayhaqi*

mengimplementasikan konsep ekonomi islam untuk mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN YANG BEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** lalu penulis dapat merumuskan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja ?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Islam terhadap anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peran yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja.
2. Mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi Islam terhadap anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan : *pertama* bagi akademisi, memberikan sumbangsih hasil

pemikiran tentang maraknya pekerja anak di bawah umur yang banyak ditemukan di lapangan dan melihat peran dari pemerintah agar dapat di hapuskan pekerja anak di bawah umur karena dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak. *Kedua*, bagi penulis menambah wawasan mengenai peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja khususnya di Kota Bandar Lampung serta mengetahui peran pemerintah dalam mengimplementasikan konsep ekonomi islam terhadap anak jalanan yang bekerja di Kota Bandar Lampung.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana peran pemerintah terkait masalah anak jalanan yang bekerja serta perspektif Ekonomi Islamnya.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat dinikmati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang

digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah langkah tertentu yang bersifat logis.³⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Secara keseluruhan jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik dan sebagainya, melainkan menggunakan penekanan ilmiah³¹ atau temuan-temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi.

Bilamana terdapat ilustrasi yang menunjukkan data-data berupa angka-angka tabulasi, hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mempertajam analisa dan menguatkan argumentasi penelitian. Dan pendekatan penelitian pada skripsi ini adalah analisis deskriptif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berdasarkan fenomenologi yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk interpretasi, gambaran dan lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antar unsur-unsur yang ada atau fenomena yang

³⁰ Sugiyono, *Loc. Cit*, hlm. 2.

³¹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. Ke-8* (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hlm.6

terjadi di lapangan²². Dalam penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja dan bagaimana Islam memandangnya terkait peran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Teknik pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³²

Sampel dalam penelitian ini yaitu mengambil jumlah 10 anak yang bekerja di Kota Bandar Lampung kemudian di terapkan ke situasi sosial, seperti di anak yang bekerja di daerah Rajabasa, Wayhalim, Teluk, Kedaton, dan Pahoman.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.³³ Data sekunder juga dapat disajikan dalam bentuk diagram dan tabel-tabel yang telah diolah dan disajikan oleh pihak pengumpul

³² Sugiyono, *Loc. Cit*, hlm. 392.

³³ Soeranto dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis*, (Yogyakarta : UPP YKPN, 1990), hlm. 76

data primer atau pihak lain.³⁴ Data sekunder juga diperoleh dari sumber bacaan yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti : Al-Quran, Hadits, jurnal terkait pekerja anak, buku-buku terkait pekerja anak dan masalah sosial, artikel, karya ilmiah, data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung dan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung dan bahan-bahan penelitian yang relevan terhadap penulisan skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang lain, memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³⁵ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun pertanyaan yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara yang akan dilakukan yaitu bertempat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung. Lalu, wawancara juga akan dilakukan terhadap anak yang bekerja di tempat lokasi biasa mereka

³⁴ Soeranto dan Lincoln Arsyad, *Ibid*, hlm. 76

³⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : PT Remaja Rosidakarya, 2004), hlm. 180

bekerja sebagai pekerja anak atau di tempat umum di Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁶

Teknik ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi langsung yang terjadi di lapangan seperti melihat langsung bagaimana anak-anak jalanan bekerja sebagai pekerja anak kemudian melihat proses mereka bekerja langsung, dan kemudian dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang akan diteliti di Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan juga dapat berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.³⁷

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 203

³⁷ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 141

Data-data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung, lalu tempat pekerja anak di Kota Bandar Lampung.

d. Studi pustaka

Teknik pengumpulan yang digunakan selain menggunakan metode dokumentasi juga menggunakan teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.³⁸

Misalnya berhubungan dengan eksploitasi (pekerja anak di bawah umur) serta bacaan-bacaan baik berupa Al-Quran, Hadits, buku-buku, maupun karya tulis ilmiah seperti jurnal nasional, jurnal internasional, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan tentang peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja dalam perspektif ekonomi Islam pada skripsi ini.

5. Alat Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Bahwa analisis kualitatif digunakan untuk menyelesaikan,

³⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Bandung : Alumni, 1998), hlm. 78

mendeskripsikan, serta menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Data yang diperoleh dari wawancara mendalam (*indeph interview*) diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi (*reduction*) dan interpretasi (*interpretation*). Data yang terkumpul ditulis dalam bentuk transkrip, kemudian dilakukan pengatagorian dengan melakukan reduksi data yang terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian.

Miles dan Huberman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu :³⁹

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan tempat pekerja anak dilakukan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi ketat dengan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diferifikasi.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Loc. Cit*, hlm. 430-438.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang pokok kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian.

2. *Display* (penyajian data)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik adalah merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid untuk melihat gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka akan diusahakan membuat berbagai matrik naratif saja. Dalam *display* data ini sangat membutuhkan kemampuan data secara lebih baik.

Pada penelitian ini secara teknis data-data yang telah diorganisir kedalam matrik analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

3. *Verification* (menarik kesimpulan)

Verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan

mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴⁰

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya yaitu peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.⁴¹

Pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki jabatan tertentu,

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Peran*, akses pada <http://www.kbbi.web.id/peran>, (Sabtu, 06 Agustus 2017, 00:20 WIB)

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka,, 1984), hlm. 735.

seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.⁴²

Jadi, dari berbagai pengertian peran di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah seseorang yang mempunyai perilaku dan status tertentu yang mana dia mempunyai kewajiban atas wewenang dia di dalam suatu kelompok tertentu atau jabatan yang dimilikinya.

2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam bahasa Inggris digunakan kata “*government*”. Namun pengertian pemerintah menurut KBBI adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.⁴³

Di dalam Undang-Undang pemerintah adalah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.⁴⁴ Jadi, pemerintah ada dua macam yaitu pemerintah pusat seperti presiden, wakil presiden dan menteri-menteri (eksekutif) lalu MPR, DPR, DPD (legislatif) kemudian MA dan MK (yudikatif). Selanjutnya pemerintahan daerah yang meliputi Gubernur, Walikota/Bupati, Camat dan sebagainya.

⁴² Suwari Akhmaddhian, Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan), *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013*, (Jum'at, 11 Agustus 2017, 21.22)

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pemerintah*, akses pada <http://www.kbbi.kata.web.id/pemerintah>, (Sabtu, 06 Agustus 2017, 01:20 WIB).

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, *Tentang Keuangan Negara*

Definisi pemerintah yang dikemukakan oleh W.S. Sayre adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.⁴⁵

Kemudian, pemerintah dalam arti luas adalah menunjuk kepada alat perlengkapan negara seluruhnya (aparatur negara) sebagai badan yang melaksanakan seluruh tugas/kekuasaan negara atau melaksanakan pemerintahan dalam arti luas. Kemudian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya menunjuk kepada alat perlengkapan negara yang melaksanakan pemerintahan dalam arti sempit.⁴⁶

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan tarap hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.⁴⁷

Penulis mengambil kesimpulan dari keseluruhan definisi di atas bahwa pemerintah adalah suatu bentuk kegiatan atau aktifitas dari aparatur negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang telah diamanatkan untuk mencapai suatu tujuan negara dan kepentingan seluruh masyarakatnya.

⁴⁵ Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafie,M.Si., *Ilmu Pemerintahan*, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014), hlm. 10

⁴⁶ Drs.H.Abu Ahmadi, *Loc.Cit*, hlm. 176

⁴⁷ Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1992), hlm. 11

3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah menurut Adam Smith (1776) dalam Kuncoro terdiri dari tiga fungsi saja yaitu:⁴⁸

- a. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri,
- b. Menyelenggarakan peradilan,
- c. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Dari teori di atas pemerintah harus menyelenggarakan peradilan yang mana peradilan itu harus merata untuk semua lapisan masyarakat dan dalam pembahasan ini peran pemerintah harus mendapatkan perhatian khusus bagi pekerja anak di bawah umur.

Jadi, peran pemerintah berkaitan dengan pekerja anak di bawah umur menurut penulis yaitu suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang memiliki wewenang untuk membuat kesejahteraan bagi masyarakatnya dan menghapuskan perkara tenaga kerja di bawah umur khusus bagi anak yang bekerja agar tercapai kesejahteraan yang nantinya akan membuat masa depan mereka menjadi lebih baik dan cita-cita mereka akan tercapai.

4. Tugas dan Fungsi Pemerintah

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan

⁴⁸ Kuncoro Mudrajat, *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 260

upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.⁴⁹

Tugas-tugas pemerintahan dikemukakan oleh Rasyid mencakup tujuh aspek yaitu :⁵⁰

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak

⁴⁹ Thoha, Miftah., *Kepemimpinan dalam Manajemen*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 101

⁵⁰ Rasyid, *Loc.Cit*, hlm. 13

terlantar; menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan sebagainya.

- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
- g. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Fungsi pemerintahan menurut Ndraha diringkus menjadi dua macam fungsi, yaitu:⁵¹

- a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk layanan birokrasi.
- b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sebagaimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi

⁵¹ Ndraha, *Ilmu Pemerintahan* Jilid I, (UGM : Institut Ilmu Pemerintahan, 2001), hlm. 85

Pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.⁵²

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang begitu besar pemerintah harus terus mengembangkan sumber daya, lingkungan yang baik dan institusi yang kuat serta dukungan dari masyarakat yang tentunya akan membuat pemerintah semakin terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dengan optimal.

B. Pekerja Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Al-Qur'an anak merupakan anugrah terindah pemberian dari Allah SWT yang diharapkan oleh setiap pasangan yang sudah menikah dan merupakan sebuah kabar yang sangat gembira yang dinantikan. Sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Maryam ayat 17 Allah SWT berfirman :

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾

Artinya :

“Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma dihadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna.”⁵³

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, *tentang Administrasi Pemerintahan*

⁵³ Al-Qur'an, *Surah Maryam Ayat 17*

Selanjutnya pengertian anak di dalam Undang-undang tertera sebagai berikut “Anak ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah.”⁵⁴

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁵⁵

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, dan sejahtera menjadi sumberdaya yang berkualitas tinggi dan dapat menghadapi tantangan di masa depan.⁵⁶

Anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang.⁵⁷

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948, *tentang Undang-Undang Kerja Tahun 1948*

⁵⁵ Undang-Undang No. 13 tahun 2003, *Loc. Cit.*

⁵⁶ Restutita Darusasi dan Agus Joko Pitoyo, Jurnal “*Kondisi Demografi Dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pekerja Anak DKI Jakarta (Analisis Data Susenas KOR 2010)*”, hlm. 71 (akses pada 17-7-2017, 20.30 WIB)

⁵⁷ Solehuddin, Jurnal “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*”, *Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013*, hlm. 5 (akses pada 17-7-2017, 20.33 WIB).

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang tak ternilai bagi orang tuanya.⁵⁸

Dari pengertian di atas anak sendiri merupakan suatu pemberian dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya serta perlu adanya peran yang mendukung tumbuh kembang baik dari masyarakat, lingkungan dan pemerintah sebagai masa depan bangsa. Bukan saja mengabaikannya namun dengan memberikan hak-hak secara optimal dari sejak dini yang telah diwajibkan dari kedua orang tuanya agar menjadi anak yang baik, berprestasi dan diharapkan kelak menjadi penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa lalu senantiasa patuh dan hormat kepada kedua orang tuanya.

2. Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁹

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang dari keluarga si anak, pemerintah dan masyarakat untuk

⁵⁸ Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 114

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 2, *Loc. Cit.*

menghindarkan anak dari berbagai ancaman dan gangguan yang mungkin datang dari luar lingkungannya maupun maupun dari anak itu sendiri.⁶⁰

Pengertian hak menurut bahasa artinya tetap dan pasti. Sementara itu pengertian hak secara istilah yaitu hukum yang telah tetap menurut syariat.⁶¹

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁶²

Dalam konstitusi kita yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Hak-hak dasar anak menurut UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut :⁶³

a. Hak untuk hidup layak

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.

⁶⁰ Muhammad Djumhana, *Op.Cit*, hlm. 126

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 12

⁶² Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 52, *Loc.Cit*, hlm. 11

⁶³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, *Loc.Cit*.

b. Hak untuk berkembang

Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan

Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah.

d. Hak untuk berperan serta

Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.

e. Hak untuk memperoleh pendidikan

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal di daerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

3. Prinsip-prinsip Hak Anak

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut :⁶⁴

a. *Non diskriminasi*

Maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.

b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak*

Maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan*

Maksudnya adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

d. *Penghargaan terhadap pendapat anak*

Maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

⁶⁴ Undang-Undang No. 23 tahun 2002, *Ibid*

4. Pengertian Tenaga Kerja dan Hak Asasi Pekerja

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.⁶⁵ Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja.

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.⁶⁶

Secara normatif UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2). Dari landasan hukum, jelaslah bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari negara/pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.⁶⁷

Konsep hak asasi pekerja yaitu hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah dibilang cukup umurnya dan diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional.

⁶⁵ Undang-undang No. 13 Tahun 2003, *Loc.Cit.* hlm. 3.

⁶⁶ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 5, *Ibid*, hlm. 4.

⁶⁷ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 10 dan 11.

Bahkan di negara yang tergolong maju, negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.⁶⁸

Dalam memahami konsep ketenagakerjaan, hak memperoleh pekerjaan tentunya kesejahteraan yang paling diutamakan sebab kesejahteraan akan melahirkan suatu spritual yang akan berdampak rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap individu terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun di lingkungan tempat dia bekerja.

5. Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya.⁶⁹

Selain itu Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial Memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar 6 sampai 18 tahun.⁷⁰

⁶⁸ Anis Rosiah, Skripsi “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)”, *FM-UINSK-PBM-05-07/R0*, hlm. 13 (17-8-2017, 22.35 WIB).

⁶⁹ Departemen Sosial RI, *Anak Jalanan*, (Jakarta : Departemen Sosial, 2005), hlm. 5.

⁷⁰ Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, (Jakarta: Departemen Sosial, 2001), hlm. 30

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang sebagian waktunya mereka gunakan di jalan atau tempat-tempat umum lainnya baik untuk mencari nafkah maupun berkeliaran.

6. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas di rumah, membantu pekerjaan orang tua di ladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah :⁷¹

- a. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan
- b. Ada unsur pendidikan/pelatihan
- c. Anak tetap sekolah
- d. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek
- e. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.

Dalam hal ini masa anak-anak adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan emosional, sosial dan pematangan moral. Waktu mereka seharusnya dilewatkan dalam kegembiraan dalam suatu permainan, belajar

⁷¹ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, (Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2005), hlm. 10

dan tumbuh sehat. Masa depan mereka seharusnya dibentuk dalam keserasian kerja sama untuk memperluas wawasan dan menerima pengalaman yang baru.

7. Batas Umur Anak

Pengertian anak adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berusia dibawah 14 tahun. Penetapan batas umur ini berhubungan dengan larangan pekerjaan anak. Di dalam Al-Quran batasan antara anak-anak dan yang sudah baligh ditandai dengan mimpi basah (laki-laki) dan haid (perempuan). Baligh adalah satu masa di mana seorang anak dibebani kewajiban (taklif) syari'at dan akan dihisab yang mana baligh mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenal. Biasanya batasan laki-laki memasuki masa baligh antara usia 15 tahun ke atas sedangkan perempuan memasuki masa haid diusia 9 tahun ke atas. Dalam Al-Quran diterangkan dalam Surah An-Nur Ayat 59 Allah SWT berfirman :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya :

*“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁷²

⁷² Al-Quran, Surah An-Nur Ayat 59

Maksud ayat di atas yaitu anak yang telah baliqh sudah digolongkan telah memasuki masa remaja di atas umur 15 tahun, dan bukan masuk golongan anak di bawah umur. Sedangkan anak di bawah umur keadaan badan umumnya masih lemah dan masih sangat perlu perlindungan dari orang tua.

Dipandang dari sudut pendidikan anak masih harus bersekolah sampai umum 14 tahun, yang kira-kira sampai sekolah menengah atau sekolah kepandaian istimewa 2 atau 3 tahun sesudahnya keluar dari sekolah rendah. Dalam penetapan batas umur dan larangan pekerjaan anak terkandung cita-cita, bahwa anak-anak kita umumnya sekurang-kurangnya harus berpendidikan rendah ditambah dengan 2 atau 3 tahun sekolah menengah atau sekolah kepandaian istimewa. Batas umur 14 tahun ini sama dengan yang telah ditetapkan dalam *Converentie* internasional.⁷³

8. Pengertian Pekerja Anak

Menurut Lanny Ramli dalam Fenny Natalia, istilah pekerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah.⁷⁴

Pekerja anak yaitu anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan,

⁷³ Undang-Undang RI No 12 Tahun 1948 Pasal 1 Ayat 1, *Loc.Cit*, hlm. 8

⁷⁴ Fenny Natalia Khoe, Hak Pekerja Yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 No.1 (2013)*, (diakses pada 17-8-2017, 23.04 WIB).

membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :⁷⁵

- a. Anak bekerja setiap hari.
- b. Anak tereksplotasi.
- c. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
- d. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.⁷⁶

Pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan sedang bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu.⁷⁷

Pekerja Anak selanjutnya disingkat PA adalah anak yang berusia dibawah 15 tahun yang sudah melakukan pekerjaan berat dan berbahaya, baik yang tidak bersekolah maupun yang bersekolah.⁷⁸

Jadi, dari pengamatan di atas pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil yang usianya masih tergolong duduk di bangku sekolah. Istilah pekerja anak dapat memiliki artian pengeksploitasi anak kecil

⁷⁵ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, Loc.Cit, hlm. 10

⁷⁶ Tjandraningsih, I, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, (Bandung : Yayasan Akatiga, 1995), hlm. 8

⁷⁷ Manurung, *Keadaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Indonesia (Analisis Data Sakernas 1994)*, (Jakarta : CV. Intermedia, 1998), hlm. 7

⁷⁸ Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999, *tentang Pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak*.

atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.

Berdasarkan Undang-undang dan pengertian di atas secara idealnya anak-anak harus mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, tetapi adanya suatu kondisi tertentu dari lingkungan dan dirinya sendiri mengakibatkan adanya suatu bentuk pekerja anak.

9. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Menurut Satjipto Raharjo dalam Anis Rosiah perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷⁹

Kesejahteraan anak menurut pasal 1 angka 1a UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani.⁸⁰ Karena itu anak harus diberikan perlindungan secara khusus untuk melindungi dari hal-hal yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

⁷⁹ Anis Rosiah, *Loc.Cit*, hlm. 10

⁸⁰ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 1a, tentang *Kesejahteraan Anak*

Pendapat Sunaryati Hartono juga dalam Anis Rosiah menyatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸¹

Perlu diingat disini hukum berfungsi untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan kekerasan yang dapat merugikan dirinya sendiri dari orang lain, masyarakat maupun dari penguasa. Tidak hanya itu saja hukum juga dapat memberikan keadilan serta berfungsi menjadikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 menyatakan bahwa anak-anak tidak boleh menjalankan pekerjaan.⁸²

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 Ayat 4 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸³

Pernyataan ini juga dipertegas dengan mengesahkannya Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Konvensi ini mewajibkan setiap negara anggota ILO yang telah meratifikasinya harus

⁸¹ Anis Rosiah, *Op.Cit*, hlm. 10

⁸² Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1948 Pasal 2, *Loc.Cit*, hlm. 2

⁸³ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat 4, *Loc.Cit*, hlm. 3

segera melakukan tindakan-tindakan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.⁸⁴

Kemudian larangan dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.235/MEN/2003, tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. Menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.⁸⁵

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat 1 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Lalu pada ayat yang ke 3 melarang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.⁸⁶ Kemudian pada Pasal 68 menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁸⁷

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang Perlindungan Anak berbunyi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab

⁸⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2000, *tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*

⁸⁵ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.235/MEN/2003 Pasal 2 Ayat 1, *tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak*.

⁸⁶ Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 Pasal 74 ayat 1 dan 3, *Loc.Cit*, hlm. 17.

⁸⁷ Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003, *Ibid*, hlm. 16.

terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸⁸ Kemudian lanjutan UU yang sama dalam pasal 88 disebutkan, setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁸⁹

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.⁹⁰

Kemudian Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Membuat Keputusan Nomor : Kep.115/Men/VII/2004 Pasal 4 ayat 1, tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat yang menetapkan Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat tanpa pengawasan langsung orang tua/wali.⁹¹

Perlindungan hukum-hukum di Indonesia yang dibuat untuk pengawasan terhadap pekerja anak hendaknya menjadi prioritas utama, agar perlindungan terhadap hak-hak anak dapat diwujudkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab berbagai institusi di

⁸⁸ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 20, *Loc.Cit*, hlm. 4.

⁸⁹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 88, *Ibid*, hlm. 13.

⁹⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002, *tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*

⁹¹ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 115/MEN/Vii/2004, *tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat Dan Minat*.

negara ini. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dapat dikoordinasikan secara baik, baik tingkat pusat maupun daerah sehingga terjadi keterpaduan dan sinergis dalam penanganannya.

10. Bentuk Pekerjaan Untuk Anak

Pekerja anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya. Untuk itu ada beberapa bentuk pekerjaan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk anak yaitu :

a. Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Diperbolehkan Untuk Anak

Prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :⁹²

1) Pekerjaan Ringan

Anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat :

a) Ijin tertulis dari orang tua / wali.

⁹² Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, Loc.Cit, hlm. 12.

- b) Perjanjian kerja antara Pengusaha dan Orang tua / Wali
- c) Waktu kerja maksimal 3 jam
- d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu sekolah
- e) Perlindungan K3
- f) Adanya hubungan kerja yang jelas dan
- g) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dalam hal anak bekerja pada usaha keluarganya maka persyaratan tersebut diatas yang harus dipenuhi adalah butir c, d dan e.

2) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan

Anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :

- a) Usia paling sedikit 14 tahun.
- b) Harus memenuhi syarat :

(1)Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta mendapat bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan.

(2)Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat

Untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik, anak perlu diberikan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan minatnya.

Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah

telah mengesahkan kebijakan berupa Kepmenakertrans No. Kep.115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

Dalam Kepmenakertrans tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, harus memenuhi kriteria :

- a) Pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini
- b) Pekerjaan tersebut diminati anak
- c) Pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak
- d) Pekerjaan tersebut menambahkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak

Dalam mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat yang berumur kurang dari 15 tahun, Pengusaha wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua / wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Mempekerjakan diluar waktu sekolah.
- c) Memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan 12 (dua belas) jam seminggu.
- d) Melibatkan orang tua / wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung.

- e) Menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
- f) Menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu.
- g) Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

b. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Yang Dilarang Untuk Anak

1) Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya. Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.⁹³

Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No 13 Tahun 2003, meliputi:

- a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.

⁹³ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, *Ibid*, hlm. 13.

c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba , psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau

d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

2) Bentuk/Jenis Pekerjaan terburuk menurut Kepmenakertrans No.Kep.235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak meliputi :

a) Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja :

(1)Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi: pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:

- mesin-mesin
- Pesawat
- Alat berat : traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang
- Instalasi : pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik.
- Peralatan lainnya: tanur, dapur peleburan, lift, pecancah.

- Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.

(2) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi :

- pekerjaan yang mengandung bahaya fisik
- pekerjaan yang mengandung bahaya kimia
- pekerjaan yang mengandung bahaya biologis

(3) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:

- Konstruksi bangunan, jembatan, irigasi / jalan
- Pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat
- Mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan.
- Dalam bangunan tempat kerja terkunci.
- Penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam.
- Dilakukan didaerah terisolir dan terpencil.
- Di Kapal.
- Dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barangbarang bekas.
- Dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00

b) Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak :

- (1)Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
- (2)Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras.
- (3)Obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Pekerjaan yang sifat dan keadaan dalam pelaksanaan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana disebutkan di atas dapat ditinjau kembali guna menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tingkat kemajuan masyarakat.⁹⁴

Dalam garis besarnya dari pernyataan di atas, anak bekerja disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga yang tertekan dan kecendrungan dari akumulasi modal para pengusaha. Yang pertama memilih alternatif mempekerjakan anak untuk mendapatkan upah. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan kepentingan dunia bisnis para pengusaha dengan membayar upah rendah melalui pekerja anak yang umumnya dihargai murah dalam dunia kerja.

11. Faktor Timbulnya Anak Bekerja

Harian Kompas dalam Tommy Sunjoto, Pekerja Anak sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, mereka tersebar diberbagai negara di dunia,

⁹⁴ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, *Ibid*, hlm. 15.

terutama dinegara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengungkapkan anak-anak usia 5-7 tahun masih banyak yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya. Di Indonesia, hasil pendataan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 1,7 anak-anak adalah pekerja. Pekerja anak ditemukan hampir di semua kabupaten," ujar Patrick Daru, Chief Technical Adviser of the ILO Education and Skill Program.⁹⁵

Berbagai faktor memicu anak untuk bekerja disaat mereka seharusnya menikmati masa-masa yang menyenangkan. Akan tetapi mereka senantiasa berusaha untuk menyambung hidup dengan mencari uang, sehingga mereka hanya dijejali dengan pemikiran bagaimana cara untuk mencari uang. Adapun faktor-faktor yang dapat dijelaskan adalah :

a. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit.

Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti

⁹⁵ Tommy Sunjoto, Skripsi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Disektor Perkebunan Kelapa Sawit Ditinjau Dari UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Di Kabupaten Kubu Raya)*”, hlm. 13 (diakses pada 27 Agustus 2017, 18.44 WIB).

jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan. Orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kerawanan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari “sekadar membantu” menjadi pencari nafkah utama.

b. Faktor Budaya/Tradisi/Kebiasaan

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orangtua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Seperti kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung.

Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anakanaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

c. Faktor Pendidikan

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan :

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orangtua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

d. Faktor Urbanisasi

Daerah asal dari pekerja anak yang mayoritas dari pedesaan juga merupakan salah satu faktor timbulnya pekerja anak. Pedesaan yang dianggap tidak bisa memberikan jaminan perbaikan ekonomi, maka banyak orang yang mengadu nasib ke kota-kota besar dengan harapan dapat memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, tanpa kecuali para orangtua yang terbelenggu masalah ekonomi mengajak anaknya untuk dipekerjakan, mulai dijadikannya pengemis sampai pada buruh pabrik.

e. Faktor Perubahan Proses Produksi

Perkembangan zaman yang juga menuntut pada kecanggihan teknologi membuat beberapa perusahaan dalam melakukann proses produksi menggunakan alat-alat teknologi canggih. Sehingga banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh tenaga ahli menjadi lebih cepat selesai hanya dengan hitungan waktu yang sangat singkat dikerjakan oleh sebuah alat. Yang tersisa hanyalah pekerjaan kasar dan serabutan yang ternyata banyak anak yang diambil untuk dipekerjakan, tentu saja dengan upah murah dan jaminan perlindungan kerja yang minim, karena masih dianggap sebagai anak yang tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu menuruti aturan yang dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.⁹⁶

Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang membuat anak bekerja di bawah umur. Akan tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.⁹⁷

12. Dampak Negatif dari Pekerja Anak Terhadap Perkembangan Anak

Larangan mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu

⁹⁶ Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, *MODUL PENANGANAN PEKERJA ANAK*, Op.Cit, hlm. 16.

⁹⁷ Zahratul Husnaini, Skripsi “*PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi kasus : Enkulturasi Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang)*”, (Program S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2011), hlm. 6 (diakses pada 28 Agustus 2017, 18.50 WIB).

berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

Berikut penjelasannya :

a. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Fisik Anak

Secara fisik pekerja anak lebih rentan dibanding orang dewasa karena fisik mereka masih dalam masa pertumbuhan. Bekerja sebagai pekerja anak dapat mempengaruhi perkembangan kesehatan fisik mereka karena pekerjaan yang mereka lakukan dapat menimbulkan kecelakaan maupun penyakit. Dampak kecelakaan terhadap pekerja anak dapat berupa luka-luka atau cacat akibat tergores, terpotong, terpukul, terbentur dan lain-lain, sedang kondisi yang menimbulkan penyakit antara lain kondisi tempat kerja yang sangat panas atau terlalu dingin, tempat kerja terlalu bising, terhirup debu, terhirup bahan kimia berupa uap lem, uap cat sablon, tempat kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi seksual dan lain-lain. Dampak penyakit yang ditimbulkan berupa pusing, demam, menggigil, kerusakan pada sistem syaraf (rendahnya kapasitas intelektual, daya ingat lemah dan lemahnya alat perasa), kulit, ginjal, paru-paru, sesak nafas, batuk, tuli, tertular penyakit seksual (IMS/HIV/AIDS).

b. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Emosi Anak

Pekerja anak sering bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-

wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya. Dampak yang ditimbulkan berupa pekerja anak menjadi pemarah, pendendam, kasar terhadap teman sebaya atau yang lebih muda, kurang mempunyai rasa kasih sayang terhadap orang lain dan adanya perasaan empati terhadap orang lain.

c. Dampak Pekerjaan Terhadap Perkembangan Sosial Anak

Pekerja anak yang tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kegiatan seperti bermain, pergi ke sekolah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya, tidak mendapat pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak mendapat kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan ikut berpartisipasi aktif di tengah masyarakat serta menikmati hidup secara wajar biasanya akan tumbuh menjadi anak yang pasif dan egois sehingga sering berdampak anak mengalami masalah didalam interaksi / menjalin kerjasama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan.

Sebagaimana dijelaskan bahwa anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang

seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

13. Kewajiban Orangtua Terhadap Tumbuh Kembang Anak

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ﴾

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.”

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah adalah ayah dan ibu yang saling berbagi tugas, dimana ini merupakan suatu bagian dari pemeliharaan anak.⁹⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:⁹⁹

⁹⁸ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 233.

⁹⁹ Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Pasal 45, tentang Perkawinan.

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban orang tua diantaranya yaitu, sesuai dengan penghasilannya suami (kepala keluarga) menanggung:¹⁰⁰

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri,
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Islam salah satu perbuatan yang amat dianjurkan adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pada anak-anaknya terutama dibidang pendidikan dan kesehatan lalu mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 80 Ayat 4.

¹⁰¹ Abd. Al 'Ati, Mahmudah., *Keluarga Muslim*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984), hlm. 256

Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. Orang tua dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Disini menunjukkan anak mempunyai hak untuk hidup dan hak kelangsungan hidup berarti bahwa anak memiliki hak atas kehidupan yang layak dan pelayanan kesehatan.

Untuk itu peran orang tua harus selalu memantau tumbuh kembang anaknya agar dikemudian harinya anak-anak dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Beberapa kondisi yang dibutuhkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bagi orang tua, meliputi:¹⁰²

a. Lingkungan yang bahagia dan sejahtera.

Yang dimaksud adalah sepasang ayah hidup rukun dan bahagia dan sejahtera (harmonis) yang menjadi pelindung dan pembimbing anak. Yang memberikan kasih sayang dan dengan kondisi social ekonomi yang cukup kuat serta terciptanya antara manusia yang baik.

b. Pangan.

Pangan harus cukup kualitas dan kuantitasnya, sebab kekurangan dalam bidang ini akan menghambat tumbuh-kembang anak.

¹⁰² Suherman, *Buku Saku Perkembangan Anak*, (Penerbit : Kedokteran EGC, 2000), hlm. 11

c. Perumahan.

Rumah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, halaman rumah cukup luas untuk ruang gerak yang bebas mengingat anak sangat aktif.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :¹⁰³

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Selanjutnya, diteruskan juga pada Pasal 45 Ayat 1 dimana Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.¹⁰⁴

Islam menekankan agar orang tua dalam mendidik anak tidak memaksakan kehendaknya. Mereka diingatkan bahwa anak-anak harus dipersiapkan untuk menghadapi zaman yang akan dilaluinya dikemudian hari. Kemampuan orang tua menangkap kecenderungan positif dari perkembangan anak menjadi sangat penting. Orang tua berkewajiban mendorong dan mengarahkan perkembangan positif anak, ukuran pokok dari

¹⁰³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, *Loc.Cit*, hlm. 5

¹⁰⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, *Ibid*, hlm. 8.

pengarahan dan bimbingan itu adalah sejauh mana perkembangan anak sejalan dengan norma dan kewajiban agama.

C. Ekonomi Islam

Suatu pembangunan yang merata tidak hanya difokuskan terhadap sumber daya yang dikelola dengan baik, pendistribusian yang merata dan tersebar luas, dan keinginan kuat dari kita untuk membangun. Namun lebih dari itu, peran pemerintah dalam pengelolaan pembangunan masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut agar pembangunan ekonomi di negara kita dapat adil dan merata karena dalam suatu keadilan yang merata akan timbul suatu kesenjangan sosial yang baik dikemudian hari. Untuk itu dalam prinsip keadilan, Islam sangat menekankan agar umatnya mendapat keadilan dari pemimpin (khalifah) yang telah ditugaskan dan diamanatkan sebagaimana berpedoman pada Al-Qur'an serta yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan penuh tanggung jawab.

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk pengembangan moral masyarakat. Dalam hal ini ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Loc.Cit*, hlm. 18.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah.¹⁰⁶

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun suatu perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Untuk itu ekonomi Islam memegang prinsip kesejahteraan sosial yang diukur dengan aktivitas ekonomi individu dengan mempertimbangkan aspek sosial, sehingga individu dalam kegiatan ekonomi merupakan unit dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Prinsip-prinsip Dasar Ekonomi Islam Tentang Keadilan dan Perlindungan

Ekonomi Islam dalam bahasa arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-istishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan yang maksudnya jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran kemudian *al-Islami* dimaksudkan berkeadilan.¹⁰⁷

Al-Qur'an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan seperti bunyi firman-Nya dalam Surah An-Nahl Ayat 90 :

¹⁰⁶ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : LPPI, 2006), hlm. 6.

¹⁰⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op.Cit*, hlm. 16.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*¹⁰⁸

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹⁰⁹

Islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya semua anggota keluarga itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Islam tidak membedakan pria ataupun wanita, putih atau hitam. Secara

¹⁰⁸ Al-Qur'an, Surah An-Nahl Ayat 90.

¹⁰⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 74.

sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan. Inti keadilan adalah persamaan hak, yang pada hakikatnya manusia itu adalah sama dan sederajat, mereka bersaudara dan satu keluarga.

Kemudian, perlindungan dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 173 :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya :

*“Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung”.*¹¹⁰

Maslahah mursalah mempunyai prinsip dasar perlindungan yang dapat menjaga hak-hak manusia dalam hal ini untuk menjaga terjadinya perlakuan-perlakuan salah (pelanggaran hak-hak) yang dapat terjadi kepada anak di bawah umur. Posisi orang tua sebagai perlindungan kepada anak-anaknya dan orang tua tidak akan pernah melalaikan kewajibannya untuk melindungi anak-anaknya. Khususnya ayah sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur keluarga untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka sangatlah dominant.

Konsep Islam pada perlindungan sendiri hakikatnya merupakan pemenuhan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena mereka

¹¹⁰ Al-Qur'an, Surah Ali Imran Ayat 173.

membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.

3. Islam Memandang Pekerja Anak

Anak dalam bahasa arab disebut dengan *al-Walad*, jamak dari *Aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil. Dan di dalam Fiqih Lima Madzab, Anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.¹¹¹ Disaat usia ini anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan, karena usia ini anak harus memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan.

Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.¹¹²

Orang tua dalam hukum Islam dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum

¹¹¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* terj. Masykur dan Afif Muhammad, (Jakarta : Lentera, 2008), hlm. 317.

¹¹² Chaerul Uman, *Ushul fiqh I*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2000), hlm. 138-139.

berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 tentang kewajiban orang tua :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْأُولَادِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”¹¹³

Bahwa dalam ayat di atas yang berkewajiban memberikan nafkah (merupakan bagian dari pemeliharaan anak) adalah ayah dan ibu yang saling berbagi tugas.

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih dibawah umur dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri.

¹¹³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 233.

Seharusnya anak yang masih dibawah umur mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya bukan justru disuruh bekerja yang menimbulkan dampak negatif terhadap diri anaknya. Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 14 mewajibkan anak mengikuti perintah orang tua sebagaimana di bawah ini :

...أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَلَدَيْكَ...

Artinya :

“...bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu ...”¹¹⁴

Anak wajib mengikuti perintah orang tua maka sebaliknya juga orang tua juga wajib memberikan pendidikan kepada anak sedari dini. Sebab merekalah generasi yang akan memegang perjuangan agama Islam dan khalifah di bumi.

Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindakan mempekerjakan anak yang berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak merupakan pelanggaran dari kewajiban orang tua yang diwajibkan untuk menjaga anak dan merawatnya karena anak merupakan amanat yang dititipkan Allah untuk menafkahinya. Menelantarkan anak dilarang menurut hukum Islam, apalagi anak disuruh bekerja mencari nafkah untuk diri sendiri atau untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konsep dilarangnya mempekerjakan anak dalam Islam atas dasar tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah anak dalam keadaan terancam

¹¹⁴ Al-Qur'an, Surah Luqman Ayat 14.

jiwa, fisik dan mentalnya maka dilarang. Dengan begitu orang tua yang tidak memiliki perhatian serius terhadap anak dengan tidak memberikan bimbingan tentang hal-hal positif dan bermanfaat, berarti mereka telah dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dengan menjerumuskan mereka ke dalam lembah kegelapan.



BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PEMERINTAH

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5o20' sampai dengan 5o30' lintang selatan dan 105o28' sampai dengan 105o37' bujur timur. Ibu Kota Provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra dan Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan, akan tetapi dari 13 kecamatan dan 98 kelurahan tersebut telah dimekarkan menjadi 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Dalam sistem pemerintahan terdapat 17 Dinas Pemerintahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Dari 17 Dinas yang ada di Kota Bandar Lampung terdapat dua dinas yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam judul yang diambil oleh peneliti. Berikut ini adalah gambaran umum tentang dinas yang telah diteliti :

A. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Disnakertrans Kota Bandar Lampung

Dinas Tenaga Kerja adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Dinas Tenaga Kerja Kota

Bandar Lampung berdasarkan Perda Nomor 43 Tahun 2016 yaitu tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang ditindak lanjuti dengan peraturan kedudukan Dinas Tenaga Kerja dalam peraturan Walikota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Disnakertrans Kota Bandar Lampung

a. Visi

Untuk mencapai tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung menerapkan visi yaitu: Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas, mandiri, produktif, profesional dan sejahtera.

b. Misi

Untuk mendapatkan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung adalah :

- 1) Menciptakan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran melalui penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.
- 2) Meningkatkan tenaga kerja yang terampil, produktif dan profesional serta mandiri secara menyeluruh konsisten dan berkesinambungan.
- 3) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis untuk kemajuan usaha dan kesejahteraan pekerja.

3. Tugas dan Fungsi Disnakertrans Kota Bandar Lampung

a. Tugas

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung mempunyai tugas yaitu membantu Walikota melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Disnakertrans Kota Bandar Lampung

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat

- 1) Sub bagian program dan informasi
- 2) Sub bagian umum dan kepegawaian

- 3) Sub bagian keuangan dan aset
- c. Bidang Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja
 - 1) Seksi pelatihan kerja
 - 2) Seksi kompetensi dan sertifikasi
 - 3) Seksi bina lembaga pelatihan kerja
- d. Bidang Produktivitas dan Transmigrasi
 - 1) Seksi pengembangan produktivitas tenaga kerja
 - 2) Seksi pemagangan tenaga kerja
 - 3) Seksi penataan dan pengembangan transmigrasi
- e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - 1) Seksi penempatan tenaga kerja dalam negeri
 - 2) Seksi penempatan tenaga kerja luar negeri
 - 3) Seksi informasi pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja
 - 1) Seksi hubungan industrial
 - 2) Seksi syarat kerja dan jamsostek
 - 3) Seksi pembinaan organisasi dan kelembagaan tenaga kerja
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

5. Kondisi Sumber Daya Disnakertrans Kota Bandar Lampung

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung

Jabatan	Jumlah
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bagian	3 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Seksi	12 Orang
Staf	39 Orang
Jumlah	60 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2017

Tabel 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung

Golongan	Jumlah
Golongan IV	11 Orang
Golongan III	39 Orang
Golongan II	8 Orang
Golongan I	2 Orang
Jumlah	60 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2017

Tabel 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	36 Orang
Perempuan	24 Orang
Jumlah	60 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 2017

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung berjumlah 60 orang yang dapat dilihat berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin.

6. Program-program Kerja Disnakertrans Kota Bandar Lampung

- a. Program memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.
- b. Program meningkatkan produksi dan kompetensi dibidang tenaga kerja.
- c. Program meningkatkan pembinaan hubungan keindustrian dan jaminan sosial tenaga kerja.
- d. Program meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Program memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.

B. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditindak lanjuti dengan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bandar Lampung, maka terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan tipe A. Sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini tergabung dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP) yang kemudian sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2016.

2. Visi dan Misi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

a. Visi

Untuk mencapai tujuan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas PPPA Kota Bandar Lampung menerapkan visi yaitu: Terwujudnya Kota Bandar Lampung sebagai Kota Layak Anak dan Responsif Gender.

b. Misi

Untuk mendapatkan visi tersebut maka misi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adalah :

- 1) Mewujudkan hak-hak dasar perempuan dan anak
- 2) Membuat dan mendukung kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan hak perempuan dan anak

- 3) Menjaga dan melindungi serta membangun sistem pelayanan terhadap korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak
- 4) Mengembangkan dan membangun fasilitas dan prasarana ramah anak diberbagai level
- 5) Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam mewujudkan dan mengembangkan kota layak anak dengan dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, masyarakat dan lainnya.

3. Tugas dan Fungsi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

a. Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang data, informasi gender dan anak

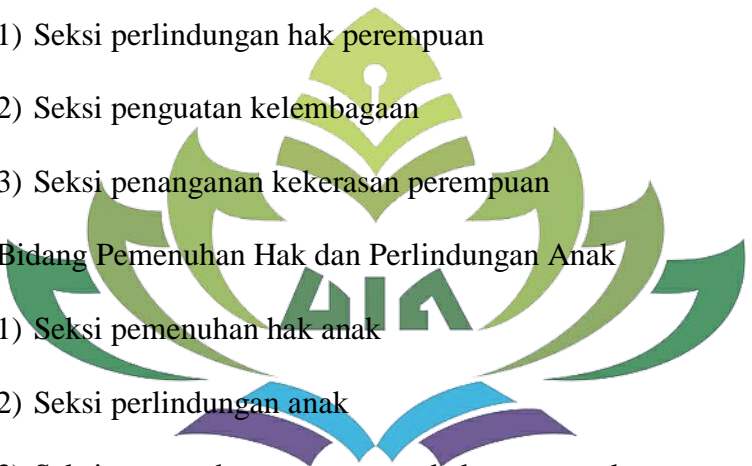
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang data, informasi gender dan anak
- 3) Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang data, informasi gender dan anak
- 4) Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang perlindungan perempuan, bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, bidang data, informasi gender dan anak
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

4. Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub bagian umum dan kepegawaian

- 2) Sub bagian program dan informasi
 - 3) Sub bagian keuangan dan aset
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
 - 1) Seksi pengarusutamaan
 - 2) Seksi pengarusutamaan gender bidang sosial, politik, hukum
 - 3) Seksi kualitas keluarga
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan
 - 1) Seksi perlindungan hak perempuan
 - 2) Seksi penguatan kelembagaan
 - 3) Seksi penanganan kekerasan perempuan
 - e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - 1) Seksi pemenuhan hak anak
 - 2) Seksi perlindungan anak
 - 3) Seksi pencegahan penanganan kekerasan anak
 - f. Bidang Data Informasi Gender dan Anak
 - 1) Seksi pengumpulan dan pengelolaan data
 - 2) Seksi analisis dan penyajian data
 - 3) Seksi partisipasi masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 

Bagan struktur organisasi Dinas PPPA sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

5. Kondisi Sumber Daya Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Jabatan	Jumlah
Kepala Dinas	1 Orang
Sekretaris	1 Orang
Kepala Bagian	3 Orang
Kepala Bidang	4 Orang
Kepala Seksi	12 Orang
Staf	36 Orang
Jumlah	57 Orang

Sumber : Dinas PPPA Kota Bandar Lampung 2017

Tabel 3.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Golongan	Jumlah
Golongan IV	8 Orang
Golongan III	24 Orang
Golongan II	9 Orang
Golongan I	16 Orang
Jumlah	57 Orang

Sumber : Dinas PPPA Kota Bandar Lampung 2017

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	22 Orang
Perempuan	35 Orang
Jumlah	57 Orang

Sumber : Dinas PPPA Kota Bandar Lampung 2017

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas PPPA Kota Bandar Lampung berjumlah 57 orang yang dapat dilihat berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin.

6. Program-program Kerja Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

- a. Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- b. Program Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan
- c. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- d. Program Data dan Informasi dan Anak

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja

1. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak yang Dilakukan Pemerintah (DISNAKERTRANS) Kota Bandar Lampung Tentang Ketenagakerjaan

Pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun pikiran. Pengertian tentang tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana membedakan pekerja/buruh berdasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh). Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan. Berdasarkan hal

tersebut Soetarso memberikan pengertian tentang tenaga kerja anak sebagai berikut :¹¹⁵

- a. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental, dan ragam sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), eksploitasi (*exploited*) dan ditelantarkan.
- b. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya, di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban) atau yang tidak lagi bersekolah.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan terdapat beberapa faktor penyebab dominan anak menjadi tenaga kerja ditemukan di lapangan antara lain ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan, potensi lokal dan pola rekrutmen, kebutuhan pendidikan dan orientasi masa depan, dan dorongan dari diri anak sendiri.

Alasan pengusaha menggunakan anak sebagai tenaga kerja disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena anak itu datang sendiri kepada

¹¹⁵ Soetarso, *Praktik Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Kopma STKS, 1999), h. 45

pengusaha untuk menawarkan tenaga. Untuk memasukan seorang tenaga kerja anak umumnya melalui prosedur yang tidak formal, tenaga kerja anak mudah diatur dan penurut bila dibandingkan dengan tenaga kerja dewasa atau karena alasan iba/kasihan dari pada terlantar bekerja di jalanan di mana kondisinya sangat berbahaya lebih baik direkrut menjadi pekerja. Berdasarkan alasan di atas, alasan utama para pengusaha mempekerjakan anak-anak, karena anak dapat diupah rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa. Pertimbangan minimalisasi biaya produksi dan prinsip ekonomi merupakan alasan rasional yang pengusaha terapkan dalam perekrutan anak sebagai tenaga kerja. Adanya motif sosial diantara pengusaha-pengusaha dalam merekrut anak-anak, seakan-akan ingin menolong anak-anak yang menganggur dengan menciptakan peluang kerja, sehingga anak bisa mendapatkan penghasilan (upah). Akan tetapi motif tersebut sebenarnya hanya merupakan dalih, karena dengan cara itu anak mendapat tanggapan positif dari lingkungannya untuk mempekerjakan anak-anak.

Bentuk eksploitasi paling umum menyangkut imbalan kerja (upah). Anak-anak cenderung menerima upah rendah atau bahkan tidak diupah sama sekali, meskipun melakukan jenis pekerjaan yang sama dengan pekerja dewasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bukan jenis pekerjaan yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja anak, tetapi status sebagai anak yang menyebabkannya. Struktur masyarakat menggambarkan anak-anak berada pada posisi yang lebih rendah dibanding orang dewasa.

Struktur sosial setempat yang demikian menjadi faktor yang penting dalam mencermati anak dari fenomena eksploitasi ekonomi. Posisi yang mengandung hubungan kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak diterapkan di seluruh bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Fenomena eksploitasi ekonomi terus dipandang secara luas, bukan hanya dalam bidang ekonomi saja melainkan juga dalam bidang sosial, politik, dan budaya setempat. Upaya hukum dalam Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Anak yang bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Bentuk Pekerjaan Terburuk. Pembangunan ketenagakerjaan sasaran utamanya diarahkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja dan menjamin kesamaan.

Berdasarkan penemuan fakta di lapangan upah yang diberikan terhadap pekerja anak di Kota Bandar Lampung terbilang rendah, berikut ini adalah gambaran upah yang diterima oleh pekerja anak di Kota Bandar Lampung :

Tabel 4.1
Upah Yang Diterima Pekerja Anak Di Kota Bandar Lampung

No.	Jenis Pekerjaan	Upah yang Diterima
1.	Penjual Koran	Rp. 1000/koran
2.	Penjual Pempek	Rp. 400/pempek
3.	Penjual Tissue	Rp. 2.500/tissue
4.	Tukang Rongsokan	Rp. 2000/satu karung gelas aqua

Sumber : Observasi Pekerja Anak di Kota Bandar Lampung

Hasil penelitian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa dalam satu bulannya penjual koran hanya mendapatkan upah sebesar Rp 720.000, penjual pempek mendapatkan upah sebesar Rp 480.000, penjual tissue mendapatkan

upah sebesar Rp 600.000, dan tukang rongsokan mendapatkan upah sebesar Rp 48.000. Para pekerja anak tersebut mendapatkan hasil dari pekerjaannya tidak terlepas dari produktifitas ataupun bekerjanya, artinya kalau anak-anak tersebut tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah atau gaji, biasa disebut *no work no pay*.

Tabel 4.2
Upah Minimum Kota (UMK) Tenaga Kerja Di Kota Bandar Lampung
Tahun 2010-2017

Tahun	Upah Minimum Kota (Rp)	TMT	No. Keputusan
2010	Rp. 776.500/bulan	01-Jan-10	No G/15/III.05/HK/2010
2011	Rp. 865.000/bulan	01-Jan-11	No G/690/III.05/HK/2010 Tgl. 31-12-2010
2012	Rp. 981.500/bulan	01-Jan-12	No G/29.Q/III.05/HK/2013
2013	Rp. 1.165.000/bulan	01-Jan-13	No G/32a/III.05/HK/2013 Tgl 22-01-2013
2014	Rp. 1.142.500/bulan	31-Des-13	No : G/922/III.05/HK/2013
2015	Rp. 1.649.500/bulan	01-Jan-15	No G/813/III.05/HK/2014
2016	Rp. 1.870.000/bulan	01-Jan-16	No G/541/III.05/HK/2015
2017	Rp. 2.054.365/bulan	01-Jan-17	No G/659/III.05/HK/2016

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data penghasilan responden di atas, hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di Kota Bandar Lampung. Hal ini tentunya jauh bisa dikatakan untuk mencapai hidup yang sejahtera.

Hal ini, apabila dikaitkan dengan persyaratan kerja bahwa pekerja harus memperoleh penghasilan atau gaji yang memadai, maka jelas penghasilan

pekerja anak yang bekerja jauh dari kenyataan dan prinsip-prinsip pengupahan, dengan demikian dari aspek perlindungan hukum, maka dapat dikatakan pekerja anak ini belum memperoleh jaminan perlindungan upah yang memadai, sebab penghasilannya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam perlindungan tenaga kerja anak yang bekerja di luar hubungan kerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, dikarenakan makin meresahkannya tenaga kerja anak dengan alasan kemiskinan keluarga, sulit dipisahkan antara partisipasi anak dalam aktivitas ekonomi dengan eksploitasi ekonomi anak.

Dalam pengawasan terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak Pemerintah Kota Bandar Lampung memanfaatkan lembaga *tripartite* dengan mengadakan tinjauan dan pembinaan bersama. Kegiatan perlindungan terhadap pekerja anak secara rutin dilaksanakan dengan mengadakan :

- a. Peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan bersama dengan tim yang tergabung dalam *tripartite*.
- b. Mengadakan bimbingan, pembinaan kepada pengusaha agar melaksanakan peraturan ketenagakerjaan khususnya yang mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja anak dan memperlakukan khusus kepada mereka ataupun sebaiknya tidak mempekerjakan pekerja anak.

- c. Meminta dan selalu mengingatkan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban melaksanakan wajib lapor tersebut sekurang-kurangnya mencantumkan, antara lain: identitas perusahaan, klasifikasi usia anak yang dipekerjakan, cara pengupahannya, jenis pekerjaan yang dilakukan, waktu kerja/lamanya bekerja, fasilitas jaminan sosial dan kesejahteraan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui *tripartite* telah melaksanakan peninjauan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam hal perlindungan terhadap pekerja anak, namun dalam kenyataannya masih terdapat perusahaan yang mempekerjakan anak dengan kondisi tereksplorasi. Kenyataan ini dimungkinkan terjadi karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Kunjungan/peninjauan untuk bimbingan dan pembinaan hanya dilakukan ke perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans, sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar justru mempekerjakan anak
- b. Jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang ada sekarang tinggal satu orang, sehingga tidak terjangkau pengawasan terhadap semua perusahaan, apalagi harus jempot bola ke perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor.

Sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari :

- a. Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah
- b. Pemerintah dalam hal ini Dinas daerah yang menangani ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsur yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan, atau penegakkan keadilan bila terjadi konflik.
- c. Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini lebih dianggap sebagai objek dari sistem hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari peraturan perundang-undangan dan pemerintah sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.

Pekerja anak sebagai anak yang bekerja atau anak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakertrans menetapkan fokus

membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, pemerintah sejak tahun 2007 hingga sekarang melaksanakan Program yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).

Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah *Condiional Cash Transfer (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan PKH diharapkan akan dapat membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya akan mempercepat pencapaian *Milennium Development Goals (MDGs)*. Terdapat 5 (lima) komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, Pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.¹¹⁶

¹¹⁶ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Pedoman Pelaksanaan PPPA-PKH*, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Bandar Lampung, 2013.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga sangat Miskin (RTSM), sebagai timbal baliknya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama PKH adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin, dengan cara :

1. Meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan).
2. Mengembangkan dan meningkatkan angka partisipasi wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin.

Angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun pada kenyatannya masih banyak ditemukan anak keluarga miskin yang tidak mengenyam pendidikan dan anak putus sekolah yang umumnya mereka diam di rumah, berada di jalanan dan bekerja. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah yang akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Anak-anak yang putus sekolah dan bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, pemerintah menerapkan Program Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (PBPTA) yang salah satunya melalui Program Pengurangan Pekerja anak dalam rangka mendukung Program keluarga Harapan (PPA-PKH) dengan target ditariknya pekerja anak dari tempat kerja secara bertahap sesuai skala prioritas.

Program ini memberikan pendampingan kepada pekerja anak untuk memotivasi agar anak mempunyai keinginan dan dapat kembali ke dunia pendidikan melalui berbagai fasilitas dan program yang ada pada instansi yang membidangi pendidikan. Program ini melibatkan berbagai instansi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Dasar Pelaksanaan kegiatan PPA-PKH :

- a. Lampiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 56, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3835 yang berbunyi : “ Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) konvensi, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menyatakan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun.”
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 mengenai pelarangan dan tindakan

segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pokok-pokok Konvensi tersebut berisi sebagai berikut :

- 1) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- 2) Anak berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
- 3) Pengertian bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah :
 - a) Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata
 - b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacur, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
 - c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
 - d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

- 4) Anggota Negara ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib menyusun program aksi untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- 5) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib mengambil langkah-langkah agar ketentuan konvensi ini dapat diterapkan secara efektif, termasuk pemberian sanksi pidana.
- 6) Negara anggota ILO yang mengesahkan konvensi ini wajib melaporkan pelaksanaannya.

c. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak yang berbunyi :

“Pemerintah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

d. Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 74 berbunyi :

- 1) “Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

- b) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
 - c) Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya; dan/atau
 - d) Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.”

Pasal 75 berbunyi :

“Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.”

- e. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak.

Pasal 1

“Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini”.

Pasal 2

“Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan Presiden ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.”

Kegiatan PPPA-PKH memiliki sinergitas dengan instansi yang terkait sehingga koordinasi dan kerjasama yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

“Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam rangka pengawasan terhadap ketaatan peraturan perundangan oleh pengusaha, salah satunya dilakukan dengan mekanisme pemantauan dengan mewajibkan pengusaha untuk menyampaikan laporan terhadap kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tersebut, sehingga apabila terjadi pelanggaran akan dengan mudah dapat dilakukan tindakan-tindakan yang diperlukan.

Pemantauan oleh aparat Disnakertrans sering ditemukan adanya sejumlah pabrik atau kegiatan usaha yang memanfaatkan tenaga kerja anak secara berlebihan. Namun demikian, aparat pemerintah tidak dapat berbuat banyak, sebab aparat pengawas jumlahnya terbatas, sehingga tidak mampu melaksanakan pemantauan dengan efektif. Selain itu, dalam pengawasan ini juga terkendala oleh sikap pengusaha yang seolah-olah tertutup dan tidak bersedia memberikan informasi mengenai kondisi pekerjaanya, khususnya pekerja anak, seringkali Disnakertrans tidak dapat berbuat banyak untuk menangani masalah pekerja anak.

Pemaparan di atas diperkuat dengan tabel hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Seksi Pengawasan berikut ini :¹¹⁷

Tabel 4.3
Hasil Wawancara Kepala Seksi Pengawasan DISNAKERTRANS
Kota Bandar Lampung

Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Mamiyani, S.E.,M.M	Apa saja program kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur ?	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi lampung hanya sebatas pengawasan, dimana pengawasannya kepada perempuan dan anak. Kita mempunyai tim/tenaga pengawas dimana sebagai PNS yang merangkap sebagai fungsional yaitu tugas mereka untuk mengawasi pekerja anak dan perempuan.</p> <p>Bisanya masalah diskriminasi yang kita awasi. Misalnya pekerja anak itu harus di atur harus bekerja di luar jam sekolah, mendapat izin dari orangtua kemudian tidak bekerja di sektor terburuk misalnya mereka disuruh bekerja di diskotik dan sebagainya dan sepanjang ini kami tidak menemukan anak yang bekerja di sektor terburuk.</p> <p>Pada tahun 2016 lalu, pemerintah membuat program PPPA (Program Pengurangan Pekerja Anak) dimana program tersebut merupakan program dari pusat dan yang kedua program PKH (Program Keluarga Harapan). Misalnya di daerah kita mencari anak yang bekerja di sektor buruh atau perkebunan kemudian kita kumpulkan dan kita rumahkan, lalu kita berikan pembekalan pendidikan kepada mereka agar mereka tau belajar itu penting terus dengan belajar nanti kita dapat penghidupan yang lebih layak. Program ini ada pendampingnya dari kita untuk melakukan</p>

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Mamiyani, S.E.,M.M. Selaku Kepala Seksi Pengawasan Disnakertrans Kota Bandar Lampung. (04 Oktober 2017, 10:00 WIB).

		<p>program-program tersebut yang berasal dari LSM untuk mengurangi pekerja anak. Program ini bertujuan sosialisasi kepada anak-anak dimana anak itu berhak belajar dan bermain bukan bekerja.</p> <p>Setelah program ini berjalan kita juga tetap masih melakukan pengawasan karena pengawasan ini merupakan program kita sendiri sedangkan yang tadi merupakan program dari pusat.</p>
	<p>Ada atau tidak hambatan program yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja anak di bawah umur ?</p>	<p>Banyak hambatannya, karena seperti pekerja anak banyak yang tidak kita ketahui misalnya tidak semua perusahaan mau terbuka menggunakan tenaga anak. Karena itu dilarang memang oleh undang-undang dan itu menjadi suatu hambatan kita yang biasanya hambatannya itu di sektor pekerjaan yang kasar atau di lapangan. Dan dilihat juga dari sistem penggajian atau pengupahan yang benar atau tidak, jam kerjanya semua harus diatur itu merupakan pengawasan kita.</p> <p>Kemudian hambatan lain seperti tidak bekerja setiap hari anak seperti pengamen jadi susah kita untuk mencari dimana mereka dan tidak disatu lokasi mereka bekerja.</p>

Maka dari itu program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum optimal terlihat dari masih banyaknya pekerja anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Kemudian masih lemahnya pengawasan terhadap anak yang bekerja di perusahaan yang mempekerjakan anak karena perusahaan bersifat tertutup sehingga perusahaan dengan leluasa mempekerjakan anak. Dengan mempekerjakan anak maka perusahaan tidak banyak mengeluarkan biaya pengeluaran yang mahal, karena perusahaan

hanya akan mengupah anak dengan harga yang jauh dengan standar upah minimum yang ada di Kota Bandar Lampung. Maka perusahaan telah melanggar aturan yang berlaku di dalam Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah.

2. Tinjauan Terhadap Pekerja Anak yang Dilakukan Pemerintah (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Secara substansial dan prinsipil mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara. Namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.

Masalah perlindungan anak sebagai pekerja memang tidak diatur dalam rumusan undang-undang tentang kesejahteraan anak. Hanya saja jika melihat

permasalahan pekerja anak dalam kerangka perlindungan anak, maka akan ditemukan bahwa pekerja anak sebagai suatu hal yang bertentangan dengan undang-undang.

Dari hasil penelitian di Dinas PPPA, bahwa Dinas PPPA Kota Bandar Lampung telah melakukan beberapa cara untuk menangani permasalahan pekerja anak. Akan tetapi program yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung hanya bersifat sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Dinas PPPA yang bekerja sama dengan Disnakertrans, Dinas Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan bahkan dari pihak kepolisian. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada orang tua dengan materi “Ayo Jangan Mempekerjakan Anak”. Sasaran Dinas PPPA adalah orang tua karena Perlindungan Anak dilakukan sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan. Oleh sebab itu perlunya pengetahuan yang cukup untuk orang tua demi melindungi generasi penerus bangsa.

Menurut Dinas PPPA bahwa Kota Bandar Lampung akan menjadi kota layak anak, kota layak anak merupakan kota yang layak untuk anak-anak, jika layak untuk anak otomatis akan layak untuk orang dewasa. Hal yang akan dilakukan seperti pelayanan kesehatan anak, pendidikan anak, dan tidak ada pekerja anak.

Pemaparan di atas diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak :¹¹⁸

Tabel 4.4
Hasil Wawancara Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Nama	Pertanyaan	Hasil Wawancara
Ruth Dora Nababan, SE.	Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, apa saja program yang sudah diberikan Dinas PPPA kepada anak ?	Kami hanya sifatnya sosialisasi kita membentuk untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak yang dicanangkan pada hari anak tanggal 23 Juli 2017 yang mana Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Kota layak anak itu ada pelayanan kesehatan, pendidikan, tidak ada pekerja anak, tidak ada pernikahan dini, tidak ada seks bebas dan melarang narkoba. Menciptakan agar tidak terjadi pernikahan dini yaitu dengan tugas orang tua bagaimana memonitor anak agar bergaul dengan sehat. Harapan kami yaitu berusaha untuk meminimalisir atau menekan kejahatan seksual, tidak ada lagi anak yang bekerja dan menjauhkan anak dari narkoba.
	Bagaimana cara mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur menurut Dinas PPPA ?	Kita hanya sifatnya bersosialisasi dan menghimbau kepada orangtua untuk wajib sekolah jangan dipekerjakan dahulu, membantu boleh tapi harus tetap sekolah dan tidak mengganggu aktifitas sekolahnya. Sekarang sudah banyak program pendidikan gratis yang diberikan pak wali kepada orangtua agar anaknya wajib sekolah. Kita juga harus melihat dari berbagai sisi dari faktor ekonomi karena anak butuh uang jajan dimana pada usia anak-anak melihat kawannya jajan dia juga ingin membeli apa

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, SE. Selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung. (14 September 2017, 10:43 WIB).

		<p>yang dibeli kawannya itu sudah merupakan alamiah dari anak kecil itu.</p> <p>Walaupun kami sudah bersosialisasi dan menghimbau, pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan anak-anak untuk bersekolah. Contohnya di daerah Teluk yang dekat dengan pantai mereka walaupun sudah dibelikan baju sekolah tetap tidak mau untuk sekolah karena sifat keluarga juga bervariasi. Mungkin anak yang tidak mau sekolah disebabkan di sekolah ada mata pelajarannya yang tidak dia disenangi lalu pulang mengerjakan PR. Dia lebih senang menangkap ikan lalu menghasilkan uang, tapi dia tidak memikirkan kedepan masa depannya seperti apa. Tempat kami sering mensosialisasikan biasanya di daerah pinggiran-pinggiran seperti daerah Teluk, Panjang, Rajabasa, Kemiling dan tempat lain seperti di Posyandu, pengajian dan ibu-ibu PKK kader estafet langsung ke masyarakat.</p>
--	--	---

Menurut penulis, dari kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak pemerintah sudah menjalankan tugasnya namun faktanya dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku masyarakat itu sendiri masih terpola dan anak sendiri merasa jika sudah mendapatkan uang maka mereka tidak mau untuk bersekolah lagi. Kemudian, lemahnya peran orang tua untuk mengajak anak bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk masa depan anak itu sendiri.

B. Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Konsep Ekonomi Islam Terhadap Anak Jalanan Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung

Anak dalam bahasa arab disebut dengan *al-Walad*, jamak dari *Aulad* artinya turunan kedua manusia yang masih kecil. Dan di dalam Fiqih Lima Madzab, Anak adalah mereka yang belum haid bagi perempuan dan belum mengeluarkan sperma bagi laki-laki/belum berusia 15 tahun.¹¹⁹ Disaat usia ini anak dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan, karena usia ini anak harus memenuhi kewajibannya untuk memperoleh pendidikan.

Konsep Islam pada perlindungan sendiri hakikatnya merupakan pemenuhan hak bagi anak-anak yang masih kecil. Karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun suatu perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Untuk itu ekonomi Islam memegang prinsip kesejahteraan sosial yang diukur dengan aktivitas ekonomi individu dengan mempertimbangkan aspek sosial, sehingga individu dalam kegiatan ekonomi merupakan unit dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Di dalam Al-Quran batasan antara anak-anak dan yang sudah baliqh ditandai dengan mimpi basah (laki-laki) dan haid (perempuan). Baligh adalah

¹¹⁹ M. Jawad Mughniyah, *Loc.Cit*, h.317.

satu masa dimana seorang anak dibebani kewajiban (taklif) syari'at dan akan dihisab yang mana baligh mempunyai tanda-tanda yang dapat dikenal. Biasanya batasan laki-laki memasuki masa baliqh antara usia 15 tahun ke atas sedangkan perempuan memasuki masa haid diusia 9 tahun ke atas. Dalam Al-Quran diterangkan dalam Surah An-Nur Ayat 59 Allah SWT berfirman :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾

Artinya :

*“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*¹²⁰

Maksud ayat di atas yaitu anak yang telah baligh sudah digolongkan telah memasuki masa remaja di atas umur 15 tahun, dan bukan masuk golongan anak di bawah umur. Sedangkan anak di bawah umur keadaan badan umumnya masih lemah dan masih sangat perlu perlindungan dari orang tua.

Periodisasi umur dalam kaitannya dengan kecakapan hukum, seseorang tersebut dinyatakan sebagai manusia dewasa. Dalam Islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rusyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri.¹²¹ Periodisasi kecakapan hukum seseorang

¹²⁰ Al-Quran, Surah An-Nur Ayat 59

¹²¹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006), hlm. 1

tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya :

a. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

b. Peranan *Aql* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah *aql* (bernalar). Bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.

c. Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Kemampuan *aql* atau nalar adalah hal yang diperhitungkan pertama kali pada seorang anak untuk disebut *mumayyiz*.

d. *Bulugh* (tanda-tanda pubertas fisik) dan ciri khasnya

Ketika anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik, fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

e. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat. Seorang anak kuli bangunan misalnya, mempunyai kecakapan dalam bidang membangun rumah, caranya mengaduk labur (campuran pasir, semen dan gamping). Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.

Dalam hukum Islam, bahwa kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah* yang berarti kelayakan. Atas dasar itu, kecakapan hukum (*al-ahliyyah*) didefinisikan sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai “kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syariah”.¹²²

Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Orang tua dianjurkan untuk berbuat baik pula pada anak-anaknya (yang membutuhkan) terutama dibidang pendidikan dan mengajar mereka secara layak. Tanggung jawab seorang Muslim atas kesejahteraan anak-anak mereka merupakan prioritas utama.¹²³

Tugas menyiapkan generasi penerus yang berkualitas adalah tugas utama dari suami dan istri. Al-Qur'an memerintahkan agar suami dan istri (ayah dan ibu) mempersiapkan generasi yang berkualitas dan takut akan hadirnya generasi yang lemah sebagaimana firman Allah SWT.

¹²² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109.

¹²³ Mahmudah Abd. Al-Ati, *Loc.Cit*, h. 256.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-Nisa' : 9).¹²⁴

Ayat tersebut mengingatkan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunan yang lemah, lemah dalam segala hal. Baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah.¹²⁵ Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara formal.

Orang tua dalam hukum Islam dilarang menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Maka tidak memenuhi kebutuhan anak adalah larangan Syara' (hukum Islam). Berdasarkan ayat di atas mempunyai akibat hukum berupa perintah (wajib) untuk memberikan nafkah kepada anak. Jika orang tua tidak memberi nafkah maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap perintah (wajib).

Biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari anak, terutama kebutuhan primer (sandang pangan papan dan pendidikan), selama mereka masih di bawah umur

¹²⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa' Ayat 9.

¹²⁵ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), h. 87-

dan tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (sekaligus tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang mencukupi) sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua. Hakikatnya Anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga karena mereka masih belum bisa untuk menjaga diri. Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *maslahah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.

Tingginya jumlah pekerja anak di Indonesia masih menjadi salah satu problem serius yang harus ditangani secara komprehensif. Terhitung sejak 1992 hingga sekarang, pemerintah Indonesia bersama sejumlah pihak terkait baik ditingkat pusat maupun daerah yang salah satunya merupakan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung terus mengupayakan mengurangi jumlah pekerja anak secara signifikan terutama pada sejumlah jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan yang berbahaya bagi anak.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak Pasal 1 menyatakan, Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang

membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. Ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.¹²⁶

Akan tetapi dari hasil penelitian, banyak anak di Kota Bandar Lampung yang seharusnya dinafkahi terkadang harus mencari nafkah juga untuk membantu orang tua dalam mempertahankan hidup. Masa kanak-kanaknya terampas dan harus mengemban kewajiban karena faktor kemiskinan. Dan semakin maraknya tingkat pekerja anak yang belum bisa diatasi dan anak-anak yang tidak sekolah juga masih tinggi berdasarkan data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Berdasarkan *istiqla* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-Qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.¹²⁷ Dengan kata lain, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung *mashlahah*. Pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara. Demikian pula lahirnya UU RI No. 13 Tahun 2003

¹²⁶ Kementrian Dalam Negeri, dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 pasal 1 ayat (1) dan (4), *Loc.Cit*

¹²⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h. 423.

tentang Ketenagakerjaan, tentunya untuk memperoleh kemashlahatan menolak kemudaratan.

Kemashlahatan adanya UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja, dan hak-haknya. Sedangkan untuk menolak kemudaratan adalah dibatasinya kesewenang-wenangan pengusaha dalam menggunakan dan memanfaatkan tenaga kerja. Dengan kata lain, melalui undang-undang di atas, maka pengusaha atau majikan tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang mengeksploitir tenaganya para pekerja.

Mempekerjakan anak di bawah umur dalam keluarga atau dalam masyarakat mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa dan mentalnya maka tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *masalah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan juga tindakan eksploitasi anak di bawah umur mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa yaitu membahayakan keturunan. Maka tindakan mempekerjakan anak dilarang menurut hukum Islam.

Dharuriyah yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Dapat dikatakan juga *dharuriyah* adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya

kehidupan.¹²⁸ *Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang dapat menjadi tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, kerusakan merajalela, timbulah fitnah, dan kehancuran yang hebat.¹²⁹

Dilarangnya mempekerjakan anak di bawah umur juga sesuai dengan larangan yang terdapat Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum Islam mempekerjakan anak dilarang atas dasar *maslahah mursalah* yang membahayakan jiwa anak dan membahayakan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dan bangsa. Akan tetapi jika menyuruh anak bekerja dengan tujuan mendidik dan membantu orang tuanya dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi jiwa, fisik serta mentalnya maka diperbolehkan karena sesuai dengan *maslahah mursalah* dan syaria Islam.

Dalam Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan pasal yang menjelaskan tentang anak khususnya pekerja anak dibawah umur. Bunyi pasal-pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 68, “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.
- b. Pasal 69 ayat (1), “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial,

¹²⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 101-105.

¹²⁹ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I, Loc.Cit*, h. 138-139.

Pasal 69 ayat (2), “Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

c. Pasal 69 ayat (3),”dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya”.

d. Pasal 70 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan/pelatihan yang disahkan oleh pejabat berwenang”.

Pasal 70 ayat (2), “Anak tersebut paling sedikit berumur 14 tahun”.

Pasal 70 ayat (3), “Syaratnya : diberi petunjuk jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan, diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja”.

e. Pasal 71 ayat (1), “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”.

Pasal 71 ayat (2), “Pengusaha yang memperkerjakan anak sebagaimana ayat (1) wajib memenuhi syarat : dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam/hari, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

- f. Pasal 72, “ Dalam hal anak diperkerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa”.
- g. Pasal 73, “Anak dianggap bekerja bilamana di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”.
- h. Pasal 74 ayat (1) dan (2), “ Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk meliputi : segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan/sejenisnya, segala pekerjaan memanfaatkan, menyediakan, menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno/perjudian, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan/ melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan miras, napza, semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.¹³⁰
- i. Pasal 75 ayat (1), “ Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”.
- Pasal 75 ayat (2), “ Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah”.¹³¹

¹³⁰ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Loc.Cit*, h. 26.

¹³¹ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, *Ibid*, h. 29-31.

Mencermati Pasal 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, dan 75 UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di atas, jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemashlahatan, maka pasal-pasal dalam UU RI No. 13 Tahun 2003 termasuk *mashlahah al-dharûriyyat* yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Setiap manusia membutuhkan pekerjaan, demikian pula seorang anak yang kebetulan orang tuanya dihipit kesulitan ekonomi akan mendorong anak itu untuk bekerja. Itulah sebabnya Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003 membuka peluang bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Namun undang-undang ini mensyaratkan pada pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi syarat : ada izin tertulis dari orang tua/wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 69 dan 68 ini dimaksudkan untuk mengambil *mashlahat* sekaligus menolak kemudharatan. Mashlahatnya yaitu untuk dapat mengurangi pengangguran, sedangkan untuk menolak kemudharatan yaitu Pasal 68, melarang pengusaha mempekerjakan anak, kecuali yang disebut dan disyaratkan dalam Pasal 69 UU RI No. 13 Tahun 2003.

Dalam pasal 68 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak, tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 69, 70, 71, 72, 73, 74,75 anak diperbolehkan bekerja dengan syarat dan ketentuan yang ada agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kebiasaan mempekerjakan anak merupakan perilaku yang sudah lazim di masyarakat. Perilaku demikian umumnya terjadi di masyarakat ekonomi kelas bawah, mereka memanfaatkan tenaga anak untuk membantu pekerjaan orangtua. Tetapi ada juga situasi dimana anak dengan sengaja dipekerjakan oleh orangtua kepada perusahaan dengan maksud membantu beban perekonomian rumah tangga mereka. Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menginisiasi (meresmikan) pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini, masalah mempekerjakan anak ada pada pasal 68-75, semua pasal itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak.

Pekerja anak adalah pekerja yang berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun. Didalam pasal 68 UU No. 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Pengusaha dapat memperkerjakan anak dengan syarat sebagai berikut diantaranya:

- a. pekerjaan itu termasuk pekerjaan ringan serta tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial,
- b. izin tertulis dari orang tua atau wali,

- c. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- d. waktu kerja maksimum 3 jam,
- e. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah,
- f. keselamatan dan kesehatan kerja,
- g. adanya hubungan yang jelas,
- h. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- i. merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang,
- j. diberi petunjuk cara kerja dan perlindungan keselamatan kerja

Dalam sejarahnya Nabi Muhammad waktu kecil sudah melakukan pekerjaan, ketika Nabi berumur 12 tahun, beliau mengikuti pamanya Abu Thalib yang berniaga membawa barang dagangan dari Makkah ke Syam. Selain itu, Nabi juga bekerja menggembala kambing secara sederhana, dapat dikatakan bahwa anak bekerja adalah wajar sejak zaman Nabi. Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, dan untuk biaya keperluan lain. Sesuai dengan syari'at islam yang mana syari'at dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.¹³²

Akan tetapi perlu memperhatikan secara lebih lanjut, motivasi, apa dan bagaimana syarat-syarat memperkerjakannya, agar hak-hak tidak terlupakan.

¹³² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), Cet. Pertama, h. 137.

Karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi para pemeluknya. Seperti yang terdapat dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 185:¹³³

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

Tampak jelas bahwa ternyata masalah anak bekerja, walaupun tidak secara tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti di luar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau diperkerjakan, dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. Padahal, jika dalam nash Al Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur, maka dalam hal ini masuk kriteria hukum mubah (boleh).

Di samping adanya peraturan UU yang dibuat oleh pemerintah dalam hal larangan pekerja anak Al-Quran juga menjelaskan tentang bagaimana pemerintah berkewajiban sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi dalam konsep keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya, hal tersebut terdapat dalam Surat An-Nahl Ayat 90 Allah SWT berfirman :¹³⁴

¹³³ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah Ayat 185.

¹³⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nahl Ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Maksud dari ayat di atas yaitu sesungguhnya orang-orang (pemimpin) yang berlaku adil, wajib dapat memberikan hak kepada masing-masing yang mempunyai hak dengan menunaikan kewajibannya secara sempurna. Jika sebagai pemimpin, maka ia memenuhi kewajibannya terhadap orang yang berada di bawah kepemimpinannya agar masyarakatnya dapat menjadi sejahtera.

Hadist Rasulullah SAW juga menjelaskan tanggung jawab seorang pemimpin untuk berlaku adil kepada orang yang dipimpinnya untuk di pertanggung jawabkan agar menjadi masyarakat yang sejahtera, Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat hadist Sahih Bukhari Muslim:¹³⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

¹³⁵ Hadist, Sahih Al-Bukhari dan Muslim

“Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungan jawab) darihal hal yang dipimpinnya.

Dalam hadis ini pula dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggun jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi, yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang dipimpin. Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan apabila tanggung jawab pemimpinnya masih hanya memikirkan dirinya sendiri.

Penjabaran penelitian di atas bahwa peran pemerintah Kota Bandar Lampung dalam konsep ajaran Islam khusus dalam program mengatasi masalah pekerja anak sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin (khalifah). Dimana pemerintah Kota Bandara Lampung (Disnakertrans dan Dinas PPPA) sudah menjalankan program-program yang dibuat seperti

program PKH (Program Keluarga Harapan) yang lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, kemudian program PPA (Pengurangan Pekerja Anak) dimana program ini mensosialisasikan kepada orang tua tentang larangan mempekerjakan anak dan mewajibkan anak untuk bersekolah. Ada juga program pemerintah Wajib Belajar 12 Tahun yang mewajibkan anak sekolah sampai ke jenjang SMA, kemudian ada program Bina Lingkungan untuk membantu keadaan ekonomi orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya agar anak mereka tetap dapat bersekolah.

Program-program yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya seperti program yang telah dilakukan di atas, maka pemerintah dalam prinsip ekonomi Islam telah menjalankan prinsip itu seperti kesejahteraan umat dan berlaku adil. Dimana pemerintah berupaya untuk menjadikan masyarakatnya menjadi masyarakat yang mempunyai keluarga yang sehat dan sejahtera dan berlaku adil dalam mendapatkan program bantuan dari pemerintah.

Untuk mensukseskan program pemerintah perlu bagi pemerintah untuk mengajak segenap pihak untuk terlibat termasuk masyarakat itu sendiri dalam upaya pola penanganan pekerja anak yang meliputi upaya pencegahan pekerja anak, perlindungan pekerja anak, dan penghapusan pekerja anak. Oleh karena itu, dalam penanganan pekerja anak untuk peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat sangatlah penting, program-program kegiatan yang telah dilakukan pemerintah juga sudah berjalan sebagaimana meliputi sosialisasi

kesadaran orang tua dan masyarakat, pentingnya akses pendidikan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Menurut penulis, pemerintah telah menjalankan program-program yang diberikan kepada masyarakat, orang tua dan anak namun bahwasannya kenyataan di lapangan masih banyaknya anak yang bekerja disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang merupakan akar dari permasalahan pekerja anak di Kota Bandar Lampung. Lalu pemerintah juga masih punya keterbatasan dari jumlah pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan anak itu dan ini merupakan salah satu yang menghambat pemerintah dalam mengawasi anak yang bekerja. Orang tua merupakan peran terpenting dalam mendidik anak, dimana orang tua harus saling bekerja sama agar anak mereka tidak dipekerjakan melainkan untuk terus membuat anak wajib bersekolah agar masa depan anak dapat menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Anak Jalanan Yang Bekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam yaitu :

1. Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi masalah anak jalanan yang bekerja sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai program-program yang sudah dijalankan seperti program PKH (Program Keluarga Harapan) yang lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan dan fasilitas kepada keluarga yang kurang mampu dan bantuan kepada anak mereka untuk sekolah, kemudian program PPA (Pengurangan Pekerja Anak) dimana program ini mensosialisasikan kepada orang tua dan masyarakat tentang larangan mempekerjakan anak dan mewajibkan anak untuk bersekolah agar kedepannya anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang berilmu dan berakhlak mulia.

2. Dalam Perspektif Ekonomi Islam anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Program yang telah diberikan pemerintah kepada anak jalanan yang bekerja berupa program (PKH) dan (PPPA) sudah sesuai dengan syariat Islam karena pemerintah telah menjalankan program yang dibuatnya dimana seorang pemimpin harus menjalankan amanah yang diberikan dengan seadil-adilnya dan melindungi hak-hak kepada masyarakatnya seperti yang tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nahl Ayat 90 dan Surah As-Sajdah Ayat 24. Hal itu tentu saja sudah dilakukan pemerintah melalui program tersebut yang dapat membantu keluarga dan anak mereka agar mendapatkan kehidupan yang berkecukupan dan lebih baik dalam menyejahterakan masyarakatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti mengajukan saran kepada pemerintah agar dinas seharusnya melakukan sidak atau langsung terjun ke perusahaan secara rutin mengenai anak yang bekerja di bawah umur. Dan hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam undang-undang dan memberi sanksi yang tegas apabila ada perusahaan mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan aturan di undang-undang. Kemudian perbanyak dan memperketat pengawasan pekerja anak baik di lapangan maupun di perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Al 'Ati, Mahmudah., *Keluarga Muslim*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1984.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo, Nastangin, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya : Risalah Gusti, 2000.
- Bayu Surianingrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 1992.
- Chaerul Uman, *Ushul fiqh I*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2000.
- Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum: Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung : PT Remaja Rosidakarya, 2004.
- G.Kartasapoetra Agoes Rakhmat Danny, *Ilmu Ekonomi Umum*, Edisi Pertama : CV. Armico, Bandung, 1982.
- Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta : LPPI, 2006.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Bandung : Alumni, 1998.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. Ke-8*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997.
- Manurung, *Keadaan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak di Indonesia (Analisis Data Sakernas 1994)*, Jakarta : CV. Intermedia, 1998.

M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* terj. Masykur dan Afif Muhammad, Jakarta : Lentera, 2008.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, cet.3, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.

Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1994.

Ndraha, *Ilmu Pemerintahan* Jilid I, UGM : Institut Ilmu Pemerintahan, 2001.

Prof.Dr.H.Inu Kencana Syafii, M.Si., *Ilmu Pemerintahan*, Ed.1, Cet.2, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Edisi satu : Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Rasyid, *Makna Pemerintahan*, Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya, 2000.

Soeranto dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Hukum dan Bisnis*, Yogyakarta : UPP YKPN, 1990.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru : Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Soetarso, *Praktik Pekerjaan Sosial*, Bandung : Kopma STKS, 1999.

Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-15 : CV. Alfabeta, Bandung, 2010.

_____, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Suherman, *Buku Saku Perkembangan Anak*, Penerbit : Kedokteran EGC, 2000.

Thoha, Miftah., *Kepemimpinan dalam Manajemen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Tjandraningsih, I, *Pemberdayaan Pekerja Anak*, Bandung : Yayasan Akatiga, 1995.

Undang-Undang dan Dasar Hukum Lainnya :

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.235/MEN/2003 Pasal 2 Ayat 1, *Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.*

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002, *Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.*

Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan.*

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak.*

Kumpulan Jurnal, Skripsi dan Lainnya :

Anis Rosiah, Skripsi “Pekerja Anak dan Praktek Perlindungan Hak-hak (Studi Kasus Pekerja Rumah Tangga Anak Di Sleman Yogyakarta)”, *FM-UINSK-PBM-05-07/R0*, hlm. 13 (17-8-2017, 22.35 WIB).

Astriani Rahman, Eksploitasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh, *Jurnal Universitas Gunadarma*, 2013, hlm.2 (Kamis, 19 Januari 2017, 21:30 WIB).

Nandi, Pekerja Anak Dan Permasalahannya, *Jurnal “GEA” Jurusan Pendidikan Geografi Vol. 6, No.2, Oktober 2006*, hlm.1 (Selasa, 24 Januari 2017, 21:30 WIB).

Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Internal (Studi Kasus Di Kota Kediri), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.2 Mei 2012 (Senin, 23 Januari 2017, 21:30 WIB).

Restutita Darusasi dan Agus Joko Pitoyo, *Jurnal “Kondisi Demografi Dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Pekerja Anak DKI Jakarta (Analisis Data Susenas KOR 2010)”*, hlm. 71 (akses pada 17-7-2017, 20.30 WIB).

Solehuddin, *Jurnal “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan Cv. Karya Sejati Kabupaten Sampang)”*, *Jurnal Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013*, hlm. 5 (akses pada 17-7-2017, 20.33 WIB).

LAMPIRAN 4

Pedoman Wawancara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung.

Identitas Narasumber yang akan diwawancarai.

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Pelaksanaan Wawancara Hari/Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan :

A. Gambaran umum Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bandar Lampung.

1. Bagaimana sejarah organisasi Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja visi dan misi Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?
3. Bagaimana gambaran struktur organisasi Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?
4. Apa saja tugas, fungsi dan tata kerja Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?
5. Apa saja program-program kerja Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?
6. Berapa jumlah pegawai keseluruhan dari Disnakertrans Kota Bandar Lampung baik yang laki-laki dan yang perempuan ?
7. Ada berapa jumlah pegawai golongan I, II, III dan IV dari Disnakertrans Kota Bandar Lampung ?

B. Pertanyaan mengenai pekerja anak di bawah umur

1. Bagaimana tanggapan Disnakertrans Kota Bandar Lampung terkait adanya masalah anak yang bekerja di bawah umur ?
2. Apa saja indikator tentang masalah pekerja anak di bawah umur ?
3. Apa saja peran pemerintah dalam mengatasi masalah anak yang bekerja di bawah umur ?
4. Untuk mengatasi masalah pekerja anak, apa saja program-program yang sudah diberikan Disnakertrans Kota Bandar Lampung terkait pekerja anak di bawah umur ?
5. Ada atau tidak hambatan program-program yang dibuat oleh Disnakertrans Kota Bandar Lampung terhadap pekerja anak ? Jelaskan.
6. Bagaimana pendapat Disnakertrans Kota Bandar Lampung tentang perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur ? lalu bagaimana mengatasinya ?
7. Sebelumnya, sudah adakah sosialisasi atau praktek dari Disnakertrans Kota Bandar Lampung tentang upaya mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur ?
8. Apa harapan dari pemerintah kedepannya tentang kasus anak yang bekerja di bawah umur ?

2. Wawancara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Identitas Narasumber yang akan diwawancarai.

Nama :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Pelaksanaan Wawancara Hari/Tanggal :

Tempat :

Pertanyaan :

A. Pertanyaan mengenai perlindungan anak

1. Jelaskan bagaimana peran pemerintah dalam hal perlindungan anak menurut Dinas PPPA Kota Bandar Lampung ?
2. Apa saja indikator tentang perlindungan terhadap anak ?
3. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak, apa saja program-program yang sudah diberikan Dinas PPPA kepada anak ?
4. Program apa saja yang sudah berjalan hingga saat ini yang telah dilakukan Dinas PPPA ?
5. Ada atau tidak kendala program yang belum terealisasi yang dibuat oleh Dinas PPPA terhadap perlindungan anak ?

B. Pertanyaan tentang masalah anak yang bekerja di bawah umur

1. Bagaimana tanggapan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung terkait adanya masalah anak yang bekerja di bawah umur ?
2. Undang-undang telah jelas melarang anak di bawah umur bekerja tanpa terkecuali. Lalu, apakah anak yang bekerja tergolong penjualan anak yang dilakukan orang tua kepada anak ?
3. Bagaimana cara mengatasi masalah anak yang bekerja di bawah umur menurut Dinas PPPA ?
4. Apa saja faktor yang memungkinkan anak di bawah umur ikut bekerja seperti orang tuanya ?
5. Bagaimanakah dampak psikologis dan sosial kedepannya bagi anak yang bekerja terus-menerus ?
6. Sebelumnya, sudah adakah sosialisasi atau praktek dari Dinas PPPA tentang perlindungan anak terhadap orang tua maupun masyarakat ?
7. Apa harapan dari pemerintah kedepannya tentang kasus anak yang bekerja di bawah umur ?
8. Bagaimana cara menumbuhkan semangat rasa ingin sekolah yang tinggi kepada anak agar mereka tidak bekerja lagi ?

LAMPIRAN 5

Hasil Coding Wawancara

1. Hasil dialog wawancara penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung

No.	Pertanyaan	Jawaban Dari Nasumber
1.	Apa saja program Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung ?	<p>1. Program memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.</p> <p>2. Program meningkatkan produksi dan kompetensi dibidang tenaga kerja.</p> <p>3. Program meningkatkan pembinaan hubungan keindustrian dan jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>4. Program meningkatkan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.</p> <p>5. Program memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.</p> <p>Program ini didukung bisa lewat magang ke luar negeri dan mengadakan job fair, untuk membuka kesempatan bagi calon pekerja untuk bekerja dengan kerja sama kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dibidangnya. Sedangkan yang untuk luar negeri kita mengadakan pemagangan seperti ke Jepang untuk merekrut sesuai kebutuhan bidang tenaga kerja yang akan dibutuhkan disana, kemudian dididik dan yang lulus seleksi baru di berangkatkan.</p> <p>Kemudian membuat pelatihan seperti diberikan pembekalan pendidikan kepada calon pekerja di bidang mesin, perhotelan, perbengkelan, masak-memasak dan menjahit.</p> <p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membuka lowongan dengan berapa jumlah kebutuhan sesuai anggaran, kemudian test ikut pendidikan yang akan mengasah kemampuan mereka untuk disalurkan ke perusahaan yang membutuhkan. Lowongan ini di publikasikan lewat web, media sosial, pamflet, atau pengumuman.</p>
2.	Bagaimana tanggapan	Tidak dibenarkan, karena anak-anak juga

	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait adanya masalah pekerja anak di bawah umur ?	mempunyai hak dimana pada saat masa anak-anak itu mereka mempunyai hak untuk belajar dan bermain kemudian belum waktunya anak-anak untuk bekerja. Kemudian biasanya mereka ini di peralat oleh orang tua agar orang melihatnya merasa kasihan, padahal itu secara mental anak itu dapat menjadi rusak karena belum waktunya untuk mencari uang.
3.	Apa saja faktor terjadinya pekerja anak di bawah umur ?	<p>Biasanya paling banyak karena faktor ekonomi sehingga anak ini dijadikan alat untuk mencari uang supaya ada belas kasihan dari orang lain.</p> <p>Faktor lingkungan sosial juga tidak memberikan dampak positif kepada dia karena faktor lingkungan yang keras dan akhirnya anak ini tidak termotivasi untuk belajar, kemudian hak-hak bermainnya dirampas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini juga merupakan kesalahan orangtua juga karena mereka egois dan hak-hak anak terabaikan.</p>
4.	Apa saja program kerja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi dalam mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur ?	<p>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandar Lampung hanya sebatas pengawasan, dimana pengawasannya kepada perempuan dan anak. Kita mempunyai tim/tenaga pengawas dimana sebagai PNS yang merangkap sebagai fungsional yaitu tugas mereka untuk mengawasi pekerja anak dan perempuan.</p> <p>Bisanya masalah diskriminasi yang kita awasi. Misalnya pekerja anak itu harus di atur harus bekerja di luar jam sekolah, mendapat izin dari orangtua kemudian tidak bekerja di sektor terburuk misalnya mereka disuruh bekerja di diskotik dan sebagainya dan sepanjang ini kami tidak menemukan anak yang bekerja di sektor terburuk.</p> <p>Pada tahun 2016 lalu, pemerintah membuat program PPPA (Program Pengurangan Pekerja Anak) dimana program tersebut merupakan program dari pusat dan yang kedua program PKH (Program Keluarga Harapan). Misalnya di daerah kita mencari anak yang bekerja di sektor buruh atau perkebunan kemudian kita kumpulkan dan kita rumahkan, lalu kita berikan pembekalan pendidikan kepada mereka agar mereka tau belajar itu penting</p>

		<p>terus dengan belajar nanti kita dapat penghidupan yang lebih layak. Program ini ada pendampingnya dari kita untuk melakukan program-program tersebut yang berasal dari LSM untuk mengurangi pekerja anak. Program ini bertujuan sosialisasi kepada anak-anak dimana anak itu berhak belajar dan bermain bukan bekerja.</p> <p>Setelah program ini berjalan kita juga tetap masih melakukan pengawasan karena pengawasan ini merupakan program kita sendiri sedangkan yang tadi merupakan program dari pusat.</p>
5.	Ada atau tidak hambatan program yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap pekerja anak di bawah umur ?	<p>Banyak hambatannya, karena seperti pekerja anak banyak yang tidak kita ketahui misalnya tidak semua perusahaan mau terbuka menggunakan tenaga anak. Karena itu dilarang memang oleh undang-undang dan itu menjadi suatu hambatan kita yang biasanya hambatannya itu di sektor pekerjaan yang kasar atau di lapangan. Dan dilihat juga dari sistem penggajian atau pengupahan yang benar atau tidak, jam kerjanya semua harus diatur itu merupakan pengawasan kita.</p> <p>Kemudian hambatan lain seperti tidak bekerja setiap hari anak seperti pengamen jadi susah kita untuk mencari dimana mereka dan tidak disatu lokasi mereka bekerja.</p>
6.	Bagaimana pendapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur ?	Sebenarnya pekerja anak itu diatur dalam undang-undang, misalnya bekerja harus sepengetahuan dan izin dari orangtua, lalu tidak bekerja di sektor terburuk dan bekerja di luar jam sekolah.
7.	Apa harapan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kedepannya tentang kasus anak yang bekerja di bawah umur ?	Harapan dinas yaitu sesuai dengan visi misi kita dimana semua tenaga kerja itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk ke masalah pekerja anak. Kalau di dinas tidak menginginkan adanya pekerja anak, tapi ini karena anak-anak yang bekerja terpaksa karena kurang adanya perhatian dari keluarga. Kemudian bekerja juga sesuai dengan umurnya tapi apabila terdapat anak yang bekerja di bawah umur harus sesuai dengan aturan undang-undang dan ada yang mendampinginya.

2. Hasil dialog wawancara penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung

No.	Pertanyaan	Jawaban Dari Narasumber
1.	Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak, apa saja program yang sudah diberikan Dinas PPPA kepada anak ?	<p>Usia anak itu sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Kami hanya memfasilitasi dan sumber datanya dari berbagai dinas lain. Kami sosialisasi ke sekolah salah satunya mengajak berbagai pihak yang menangani unsur agama, dari pihak kepolisian, lalu dari kesehatan dan itu semua merupakan upaya untuk perlindungan anak dan mencegah pekerja anak.</p> <p>Dinas PPPA ini hanya sekedar mengajak untuk tidak melakukan aborsi, tidak melakukan seks bebas, dan tidak menggunakan narkoba. Lalu buat perempuannya untuk melakukan imunisasi kepada anak, pemeriksaan kandungan, kemudian jangan mempekerjakan anak harusnya menyekolahkan anaknya yang seharusnya orangtua menyayangi anaknya. Jadi jangan juga orangtua percaya sepenuhnya dengan anak harus terus memonitor anak seperti contohnya waktu magrib anak mau keluar kita cegah, itu pasti udah melakukan hal yang tidak benar seperti nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak baik.</p> <p>Kemudian di masjid juga kita perlu ada sosialisasi untuk orang tua agar selalu mengawasi anak, jangan hanya mementingkan diri sendiri sementara anak tidak diperhatikan oleh orang tua dan orangtua percaya dengan kata-katanya. Karena sekarang kejahatan itu ada dimana-mana, untuk pelaku seksual dari orang terdekat seperti keluarga di Bandar Lampung ini cukup tinggi, jadi jangan langsung percaya orang tua menitipkan anaknya ke orang lain, semua kasus sudah ada pelaku seksual yang berasal dari keluarga dekat kita sendiri. Karena di Indonesia ini banyak ketipangan keluarga, jadi kita terus mensosialisasikan kepada orangtua agar terus menggandeng anaknya untuk selalu bersama seperti solat bersama, makan bersama, dan kumpul bersama kita sharing bersama. Kalau keluarga sudah bagus otomatis juga jalan ke akhirat sudah bagus.</p>

		<p>Kami hanya sifatnya sosialisasi kita membentuk untuk menjadikan Kota Bandar Lampung menjadi kota layak anak yang dicanangkan pada hari anak tanggal 23 Juli 2017 yang mana Bandar Lampung menjadi Kota Layak Anak. Kota layak anak itu ada pelayanan kesehatan, pendidikan, tidak ada pekerja anak, tidak ada pernikahan dini, tidak ada seks bebas dan melarang narkoba. Menciptakan agar tidak terjadi pernikahan dini yaitu dengan tugas orang tua bagaimana memonitor anak agar bergaul dengan sehat.</p> <p>Harapan kami yaitu berusaha untuk meminimalisir atau menekan kejahatan seksual, tidak ada lagi anak yang bekerja dan menjauhkan anak dari narkoba.</p>
2.	Bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan orang tua kepada anaknya ?	<p>Bentuk perlindungan awal yaitu dari seorang ibu melindungi kandungannya seperti makan-makanan bergizi yang mempengaruhi kecerdasan anak, rajin mengontrol ke posyandu atau bidan, tidak bekerja terlalu keras yang akan menimbulkan kandungannya keguguran. Kemudian bentuk perlindungan setelah lahir yaitu bayi wajib diberi ASI dan diberi imunisasi ke posyandu yang merupakan bentuk perlindungan kasih sayang orang tua. Setelah besar anak wajib disekolahkan agar masa depan anak ini menjadi mandiri dengan bentuk orang tua mengeluarkan biaya untuk sekolah anaknya dengan kerja keras dari orang tua dimana kewajiban orangtua yaitu untuk membiayai hidup anaknya.</p> <p>Bentuk perlindungan dari kesehatan juga salah satunya dari air minum, air sehat yang dikonsumsi untuk masyarakat contohnya pemerintah daerah mengharapkan agar masyarakatnya mengkonsumsi air dari PDAM karena dari segi kesehatan air minum PDAM sudah teruji dari ke higienisannya, keamanan dan unsur kesehatannya untuk mengkonsumsi air bersih. Lalu dari pak walikota sudah disediakan motor Tossa dan grobak sampah yang merupakan bentuk perlindungan dari segi kesehatan, karena lingkungan yang sehat akan menjamin anak-anak sehat untuk bermain.</p>

		<p>Lalu dari kita juga ada program dimana kita gerakkan masyarakat, ada namanya program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Artinya yang menjadi tenaga sukarelawan itu adalah masyarakat sekitar, dimana masyarakat mempunyai gerakan masyarakat. Jadi, kalau kita tetangga tau klo anaknya dipukuli kita bisa melarang masuk bagian dari mereka jangan di pukul karena ada undang-undangnya. Jadi kita bisa ngajak pamong setempat untuk kerumah orang itu untuk melerai kita berhak menegur karena anak itu masih mendapat perlindungan dari pemerintah ada undang-undangnya. Kita bekerja sama dengan BABINKAMTIBMAS dan pihak Kepolisian dalam hal unsur kekerasan terhadap anak yang merupakan bentuk kepedulian diharapkan juga masyarakat ikut peduli dalam tetangga sekitar dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.</p>
3.	Bagaimana tanggapan Dinas PPPA dalam masalah pekerja anak di bawah umur ?	<p>Kita hanya bisa meminimalisir, kita juga tidak setuju karena kita juga hanya mensosialisasikan dilarang mempekerjakan anak, narkoba, jangan menikah pada saat usia dini, jangan melakukan seks bebas dan yang terutama jangan melakukan kekerasan terhadap anak. Ikutlah selalu program-program kesehatan dari pemerintah.</p>
4.	Bagaimana cara mengatasi masalah pekerja anak di bawah umur menurut Dinas PPPA ?	<p>Kita hanya sifatnya bersosialisasi dan menghimbau kepada orangtua untuk wajib sekolah jangan dipekerjakan dahulu, membantu boleh tapi harus tetap sekolah dan tidak mengganggu aktifitas sekolahnya. Sekarang sudah banyak program pendidikan gratis yang diberikan pak wali kepada orangtua agar anaknya wajib sekolah. Kita juga harus melihat dari berbagai sisi dari faktor ekonomi karena anak butuh uang jajan dimana pada usia anak-anak melihat kawannya jajan dia juga ingin membeli apa yang dibeli kawannya itu sudah merupakan alamiah dari anak kecil itu.</p> <p>Walaupun kami sudah bersosialisasi dan menghimbau, pada kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan anak-anak untuk bersekolah. Contohnya di daerah Teluk yang dekat dengan pantai mereka walaupun sudah dibelikan baju sekolah tetap tidak mau untuk sekolah karena sifat keluarga juga bervariasi. Mungkin anak yang</p>

		tidak mau sekolah disebabkan di sekolah ada mata pelajarann yang tidak dia disenangi lalu pulang mengerjakan PR. Dia lebih senang menangkap ikan lalu menghasilkan uang, tapi dia tidak memikirkan kedepan masa depannya seperti apa. Tempat kami sering mensosialisasikan biasanya di daerah pinggiran-pinggiran seperti daerah Teluk, Panjang, Rajabasa, Kemiling dan tempat lain seperti di Posyandu, pengajian dan ibu-ibu PKK kader estafet langsung ke masyarakat.
--	--	--



LAMPIRAN 9

Dokumentasi Saat Penelitian Di Dinas Pemerintah Kota Bandar Lampung

1. Wawancara Dengan Kepala Seksi Pengawasan Disnakertrans Kota Bandar Lampung (Mamiyani, S.E.,M.M.)



2. Wawancara Dengan Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas PPPA Kota Bandar Lampung (Ruth Dora Nababan, S.E.)



Dokumentasi Anak Yang Bekerja Di Kota Bandar Lampung



Anak yang menjual *Tissue*



Anak yang menjual Koran



Anak yang merongsok barang



Anak yang menjual pempek



Anak Pengangkut Sayuran



Anak yang menambal ban